



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

TRIWULAN III 2023

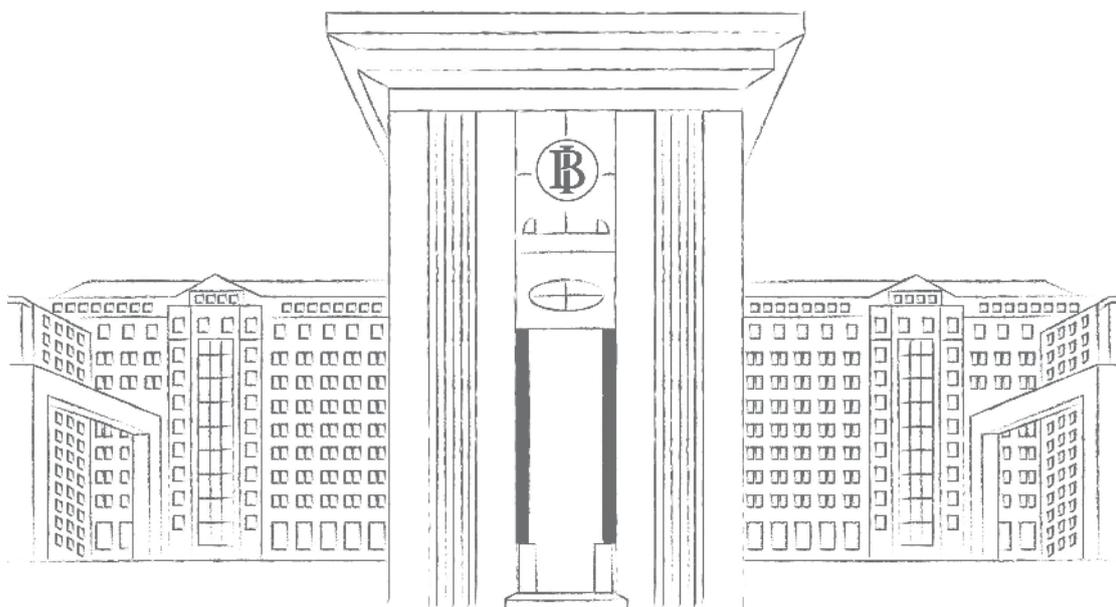


KONSISTENSI, INOVASI, DAN SINERGI

Memperkuat Transformasi Kebijakan & Kelembagaan
Memajukan Perekonomian Nasional

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

TRIWULAN III 2023



Laporan Kelembagaan Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

DAFTAR ISI



Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	viii

BAB 1	
Prospek dan Tantangan Perekonomian.....	1
1.1. Perekonomian Global.....	2
1.2. Perekonomian Domestik.....	2
1.3. Kelembagaan.....	5

BAB 2	
Respons Kebijakan Bank Indonesia.....	7
2.1. <i>Stance</i> Kebijakan Bank Indonesia.....	8
2.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia.....	8

BAB 3	
Transformasi Kelembagaan Bank Indonesia.....	13
3.1. Transformasi Kebijakan.....	14
3.2. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja.....	29
3.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja.....	31
3.4. Transformasi Digital.....	33



BAB 4	
Capaian Kinerja	
Bank Indonesia	
Triwulan III 2023	37

BAB 5	
Dewan Gubernur	
dan Kelembagaan	
Bank Indonesia	61

BAB 6	
Badan Supervisi	
Bank Indonesia	77

Lampiran	83
Daftar Kebijakan dan Ketentuan Bank Indonesia	
Triwulan III 2023.....	84
Daftar Istilah.....	88
Daftar Singkatan.....	94

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (SWT), Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat memublikasikan Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan III 2023. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lebih lanjut, laporan ini merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi bank sentral kredibel dalam mencapai tujuan yang diamanatkan secara efektif, efisien, dan taat asas. Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional sejalan dengan dinamika perkembangan eksternal dan internal, melalui prinsip independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Pada triwulan III 2023, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan di tengah perekonomian global yang melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat tinggi. Bauran kebijakan Bank Indonesia terus disinergikan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang triwulan III 2023, Bank Indonesia mempertahankan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 5,75%. Pada Oktober 2023, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%.

Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran $3,0\pm 1\%$

pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dari dampak rambatan tingginya ketidakpastian global, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan. Koordinasi pengendalian inflasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) juga diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, demikian pula koordinasi dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia juga memperluas kerja sama dengan bank sentral negara mitra, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan diseminasi *deliverable* ASEAN di bawah Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia.

Bank Indonesia memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. Pada triwulan III

2023, transformasi kebijakan Bank Indonesia mencakup penguatan berbagai ketentuan, instrumen, infrastruktur, dan koordinasi kebijakan. Transformasi kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar, mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Transformasi organisasi dan proses kerja diperkuat dan diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang kredibel berbasis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan, didukung dengan tata kelola yang baik dan profesional. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan tentang Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia sebagai wujud komitmen dalam menerapkan tata kelola yang baik dan profesional. Di area SDM dan Budaya Kerja, transformasi diarahkan untuk mendorong kepemimpinan yang kuat dan optimalisasi budaya kerja dalam mendukung sistem kerja di era digital, antara lain melalui penerbitan ketentuan Sistem Kerja Unggul di Era Digital. Hal ini diperkuat

dengan transformasi digital yang terus bergulir sesuai Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia (RIVIBI) 2022–2025. Transformasi digital dicapai melalui tiga strategi yang meliputi pengembangan *digital business platform*, pengembangan pusat data, serta peningkatan kapabilitas dan kapasitas infrastruktur teknologi dan pengamanan secara *end-to-end*. Keseluruhan program transformasi tersebut dilakukan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, untuk mendukung perwujudan visi Bank Indonesia.

Akhir kata dengan diiringi ridho Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (SWT), Bank Indonesia menerbitkan Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan III 2023 sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu rujukan yang terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama dengan semangat Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi untuk menuju Indonesia Maju.

Jakarta, November 2023

Gubernur Bank Indonesia



Perry Warjiyo





Baris pertama dari kiri ke kanan:
Perry Warjiyo Gubernur
Destry Damayanti Deputy Gubernur Senior

Baris kedua dari kiri ke kanan:
Aida S. Budiman Deputy Gubernur
Doni Primanto Joewono Deputy Gubernur
Juda Agung Deputy Gubernur
Filianingsih Hendarta Deputy Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek dan Tantangan Perekonomian

Bank Indonesia memprakirakan ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan melemah sebesar 2,9% dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik, sedangkan ekonomi Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR), diprakirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, dan oleh sebab itu memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMEs, termasuk Indonesia.

Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta dan pertumbuhan investasi yang tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diprakirakan dalam kisaran 4,5-5,3% pada 2023. Hal ini juga didukung oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang masih dapat mendukung terjaganya stabilitas eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2023 tercatat sebesar 134,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan

impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, juga terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK triwulan II 2023 sebesar 3,52% (yoy). Kembalinya inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, juga terjaga didukung oleh likuiditas yang longgar dan risiko kredit yang rendah. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat mendukung upaya Bank Indonesia untuk terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital.

Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia Triwulan III 2023

Bauran kebijakan Bank Indonesia terus disinergikan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter diarahkan untuk terus menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan instrumen lainnya, yakni kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepanjang triwulan III 2023 Bank Indonesia mempertahankan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 5,75%. *Stance* kebijakan tersebut

sebagai bentuk konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2023, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00% untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran pada 2023-2024.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Koordinasi pengendalian inflasi dalam TPIP dan TPID terus diperkuat melalui GNPIP di berbagai daerah, demikian pula koordinasi dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.

Transformasi Kelembagaan Bank Indonesia

Sejalan dengan amanat UU P2SK, Bank Indonesia terus melanjutkan dan memperkuat transformasi di area kebijakan dan area kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital, dalam rangka membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertatakelola, akuntabel, dan transparan. Transformasi di area kebijakan mencakup penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional, serta sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya.

Salah satu peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU P2SK telah selesai diterbitkan, yaitu ketentuan terkait Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka dan pengaturan terkait sistem tata kelola Bank Indonesia. Kerangka dan ketentuan tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilandasi oleh prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT) serta acuan dalam pembentukan seluruh peraturan lainnya di Bank Indonesia. Sejalan dengan penyempurnaan sistem tata kelola tersebut, Bank Indonesia melakukan penajaman visi dan misi Bank Indonesia agar selaras dengan amanat UU P2SK. Bank Indonesia juga melanjutkan transformasi SDM dan budaya kerja secara terencana, terprogram, dan transparan untuk memperkuat kepemimpinan yang berintegritas, kompeten, profesional, *agile* terhadap perubahan, dan berperilaku mulia. Selain itu, transformasi digital terus diperkuat untuk mendukung proses kerja kebijakan maupun kelembagaan menuju visi sebagai bank sentral terdepan.

Kinerja Kelembagaan Bank Indonesia

Transformasi kelembagaan senantiasa dilandasi oleh prinsip sistem tata kelola Bank Indonesia sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia pada triwulan III 2023 yang sesuai dengan targetnya. Hal tersebut tecermin dari realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun kinerja anggaran Bank Indonesia yang didukung sejumlah pengakuan *stakeholder* dan penghargaan baik nasional maupun internasional. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan wujud nyata dari penerapan kebijakan yang konsisten, inovasi yang berkelanjutan, dan eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait. Capaian tersebut didukung pula oleh upaya menjaga kredibilitas institusi melalui penajaman atas bauran kebijakan kelembagaan dan sistem tata kelola Bank Indonesia.





BAB 1

Prospek dan Tantangan Perekonomian





Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Jakarta

1.1. Perekonomian Global

Perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan sebesar 2,9% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik, sedangkan ekonomi Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk FFR, diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan *yield* obligasi Pemerintah negara maju, khususnya AS (US Treasury), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Berbagai perkembangan tersebut mendorong pembalikan arus modal dari negara *Emerging Market Economies* (EMEs) ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid, yang mengakibatkan dolar AS menguat secara tajam terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian

ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, dan karenanya memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMEs, termasuk Indonesia.

1.2. Perekonomian Domestik

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda, yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian PSN. Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulampua, Kalimantan, dan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan meningkat pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan

pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan, Bank Indonesia terus meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dengan sinergitas kebijakan fiskal Pemerintah yang semakin erat.

Kinerja NPI mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal. Surplus neraca perdagangan masih berlanjut pada triwulan III 2023 sebesar 7,8 miliar dolar AS dan menopang prospek transaksi berjalan tetap sehat. Sementara itu, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mendorong aliran keluar modal asing (*net outflows*) dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan III 2023 sebesar 2,1 miliar dolar AS. Tekanan terhadap aliran modal asing terus berlanjut pada triwulan IV 2023 yang hingga 17 Oktober 2023 mencatat *net outflows* sebesar 0,4 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2023 tercatat sebesar 134,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, NPI pada 2023 diprakirakan tetap baik dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Pada 2024, NPI diprakirakan tetap terjaga didukung oleh prospek perekonomian domestik yang tetap baik, di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

Kuatnya dolar AS menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang negara lain, termasuk nilai tukar Rupiah. Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong semakin terbatasnya aliran modal ke negara berkembang dan menguatnya dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (*broad-based*), juga menekan nilai tukar Rupiah pada triwulan III 2023 yang melemah 2,99% secara *point to point* (ptp) atau 2,33% secara rerata dibandingkan dengan level triwulan II 2023. Memasuki triwulan IV 2023, semakin kuatnya dolar AS menyebabkan tekanan depresiasi berbagai mata uang negara lain meningkat, termasuk nilai tukar Rupiah. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) hingga pada 18 Oktober 2023 menguat 2,60% (ytd) mencapai level 106,21. Sangat kuatnya dolar AS ini memberikan tekanan depresiasi mata uang hampir seluruh mata uang dunia, seperti Yen Jepang, Dolar Australia, dan Euro yang melemah masing-masing 12,44%, 6,61% dan 1,40% (ytd), serta depresiasi mata uang kawasan, seperti Ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan Peso Filipina masing-masing 7,23%, 4,64% dan 1,73% (ytd). Dalam periode yang sama, dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah terdepresiasi 1,03% (ytd), relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi

mata uang sejumlah negara di kawasan dan global tersebut. Ke depan, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian *imported inflation*. Di samping intervensi di pasar valuta asing, Bank Indonesia mempercepat upaya pendalaman pasar uang Rupiah dan pasar valuta asing, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penerbitan instrumen-instrumen lain untuk meningkatkan mekanisme pasar, baik dalam meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha terus ditingkatkan dan diperluas untuk implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Inflasi terkendali dalam kisaran. Inflasi IHK triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK triwulan II 2023 sebesar 3,52% (yoy). Penurunan inflasi ini didukung oleh inflasi inti yang menurun menjadi 2,00% (yoy) dan inflasi kelompok *administered prices* yang juga lebih rendah menjadi 1,99% (yoy). Sementara itu, kelompok *volatile food* mencatat inflasi sebesar 3,62% (yoy), sejalan dengan kenaikan harga beras dan daging sapi. Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global serta tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap *imported inflation*. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024.

Bank Indonesia terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar Rupiah tetap stabil. Dalam kaitan ini, pada triwulan III 2023 kebijakan suku bunga diperkuat dengan penerbitan instrumen moneter SRBI (kontraksi) yang *pro-market*, dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik *portfolio inflows*, dengan mengoptimalkan aset Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*. Pasar menyambut baik penerbitan SRBI yang tecermin pada tingginya penawaran dibandingkan dengan target (*oversubscribed*). Pada lelang perdana tanggal

15 September 2023, terdapat penawaran sebesar Rp29,9 triliun atau 4,2 kali dari target lelang Rp7 triliun. Selanjutnya pada lelang kedua pada tanggal 20 September 2023 dengan target Rp5 triliun terdapat penawaran yang masuk 3,12 kali lipat atau sebesar Rp15,6 triliun. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan transaksi di pasar sekunder. Selain itu, penerbitan SRBI juga mendukung masuknya aliran investasi portofolio asing seperti tecermin pada net beli SRBI oleh investor nonresiden sebesar Rp9,81 triliun. Berbagai perkembangan ini secara umum menunjukkan SRBI dapat menggantikan peran *Reverse Repo* (RR) SBN sebagai instrumen moneter kontraksi dan sekaligus dapat menarik aliran modal masuk untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global.

Likuiditas perbankan dan perekonomian tetap langgar. Pertumbuhan uang primer (M0) pada triwulan III 2023 tercatat 5,4% (yoy) didorong oleh ekspansi keuangan Pemerintah di tengah perlambatan aktiva luar negeri bersih. Dalam kaitan ini, operasi keuangan Pemerintah mencatat ekspansi sebesar 16,0% (yoy) sejalan dengan pola musimannya. Sementara itu, uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) pada periode yang sama masing-masing tumbuh sebesar 4,1% (yoy) dan 6,0% (yoy). Perkembangan M2 terutama dipengaruhi oleh kredit yang tetap kuat dan operasi keuangan Pemerintah yang mencatat ekspansi. Searah dengan perkembangan di uang primer, operasi keuangan Pemerintah pada triwulan III 2023 mencatat ekspansi sebesar 13,2%. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas, baik melalui efektivitas kebijakan yang ada maupun dengan pelanggaran kebijakan makroprudensial lanjutan, untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan guna akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Longgarnya likuiditas mendukung intermediasi perbankan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Pada akhir triwulan III 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 25,83%. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap perkembangan suku bunga perbankan, di mana suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga kredit pada periode yang sama masing-masing terjaga pada 4,28% dan 9,36%. Likuiditas perbankan yang tetap memadai tersebut juga didukung oleh stimulus kebijakan makroprudensial berupa pemberian insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif dengan besaran insentif maksimum 2,8% yang telah memberikan tambahan likuiditas pada 122 bank sebesar Rp108,4 triliun. Tambahan likuiditas tersebut diperkirakan akan semakin meningkat ke depan, sejalan dengan penguatan insentif KLM menjadi sebesar maksimum 4% dan peningkatan pertumbuhan kredit pada

sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus kebijakan. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Intermediasi perbankan terus melanjutkan perbaikan. Kredit perbankan pada akhir triwulan III 2023 tumbuh 8,96% (yoy), didukung oleh *appetite* bank yang masih langgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial. Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,69% (yoy) pada periode yang sama. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,34% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang semakin meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas, inklusif, dan ekonomi hijau. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan tetap di kisaran 9-11% dan meningkat pada 2024.

Ketahanan perbankan terjaga didukung permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,62% dengan risiko kredit yang terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* /NPL) sebesar 2,50% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Agustus 2023. Ketahanan likuiditas perbankan tetap terjaga ditopang dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,54% (yoy) pada September 2023. Hasil *stress-test* Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada triwulan III 2023, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 10,34% (yoy) sehingga mencapai Rp116,54 triliun, sementara nilai transaksi *digital banking* tercatat Rp15.148,71 triliun atau tumbuh sebesar 12,83% (yoy). Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 87,90% (yoy) dan mencapai Rp56,92 triliun, dengan jumlah pengguna 41,84 juta dan jumlah *merchant* 29,04 juta di mana sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara guna mendorong

inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp2.041,72 triliun atau turun sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan III 2023 meningkat 6,16% (yoy) sehingga menjadi Rp961,59 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang Rupiah ke daerah Terluar, Terdepan, Terpencil (3T) serta kegiatan kas keliling, kas titipan dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

1.3. Kelembagaan

Tantangan perekonomian global dan domestik, termasuk normalisasi kebijakan moneter pascapandemi, akselerasi megatrend digital, dan berbagai isu sustainabilitas seperti perubahan iklim serta inklusi ekonomi dan keuangan, menghadirkan tantangan yang besar. Hal tersebut bukan hanya menjadi tantangan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, namun juga kelembagaan bank sentral. Pascapandemi, tuntutan terhadap bank sentral di seluruh dunia untuk meningkatkan perannya semakin besar.

Di Indonesia, UU P2SK memperkuat landasan hukum bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengawal perekonomian nasional. UU P2SK mempertahankan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral serta memberikan penegasan kewenangan sebagai satu-satunya lembaga untuk menerbitkan alat pembayaran Rupiah Digital. UU P2SK juga memperluas tujuan Bank Indonesia menjadi mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, tugas Bank Indonesia juga dipertegas menjadi: (i) menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Pada prinsipnya, hal-hal yang tertuang dalam UU P2SK telah sejalan dengan praktik yang telah dilakukan Bank Indonesia saat ini, namun terdapat beberapa evaluasi dan penguatan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan amanat UU. Tindak lanjut Bank Indonesia terhadap amanat UU P2SK dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan jangka waktu pembentukan peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Penyelesaian tindak lanjut di Bank Indonesia dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas. Pada tahun 2023, prioritas dilakukan pada penajaman kerangka, strategi dan organisasi Bank Indonesia, baik di area kebijakan maupun kelembagaan.

Sesuai mandat UU P2SK, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Rencana kepindahan ibu kota yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mengamanatkan Bank Indonesia untuk berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mendapatkan penetapan pengalokasian lahan seluas 7,03 hektar sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 167 tanggal 15 September 2023 dan memperoleh perizinan Pembangunan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Dengan operasional Bank Indonesia di IKN yang lebih dekat dengan Pemerintah serta lembaga lain, Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal dalam melakukan sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Balikpapan



BAB 2

Respons Kebijakan Bank Indonesia





Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Oktober 2023 Cakupan Triwulanan di Jakarta

2.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia selama 2023 terus disinergikan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter diarahkan untuk terus menjaga stabilitas (*pro-stability*), khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Sepanjang triwulan III 2023, Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR pada level 5,75%, sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi

tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Pada RDG Oktober 2023, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Kenaikan tersebut untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran pada 2023-2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di bidang moneter, kebijakan suku bunga didukung oleh penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan *imported inflation* dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global, melalui:

- a. Intervensi di pasar valas pada transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder.
- b. Penerbitan SRBI sebagai instrumen operasi moneter (kontraksi) yang *pro-market* dalam rangka memperkuat

upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*.

- c. Instrumen operasi moneter valas DHE berupa TD valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia, serta penambahan frekuensi dan tenor lelang TD Valas jangka pendek dengan suku bunga kompetitif. Terkait DHE, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang mengatur prinsip dan instrumen penempatan DHE SDA serta pengaturan pengawasan DHE SDA.

Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter yang *pro-market* untuk pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik *portfolio inflows*, dengan mengoptimalkan aset surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*.

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar yang tersinergi dengan paket kebijakan terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2023, mencakup:

- a. Penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor hilirisasi minerba dan hilirisasi nonminerba (termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau.
- b. Penetapan besaran total insentif paling besar 4%, meningkat dari sebelumnya paling besar 2,8%, yang terdiri dari (i) insentif untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling besar 2%, meningkat dari sebelumnya 1,5%, (ii) insentif kepada bank penyalur kredit/pembiayaan inklusif ditingkatkan

dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%, dengan rincian 1% untuk penyaluran kredit UMKM/KUR dan 0,5% untuk penyaluran kredit UMi, dan (iii) insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau menjadi paling besar 0,5%, meningkat dari sebelumnya 0,3%.

- c. Implementasi KLM dilakukan melalui pengurangan giro di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diperkuat lebih lanjut dengan:

- a. Mempertahankan (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0% dan (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%.
- b. Melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan) bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.
- c. Melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.
- d. Menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5%; dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, berlaku mulai 1 Desember 2023.
- e. Memperkuat pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi.

Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, sehingga mendukung

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran, melalui:

- a. Penguatan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS segmen usaha mikro (UMI) berdasarkan nominal per transaksi secara progresif: (i) transaksi sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dikenakan MDR 0%, dan (ii) transaksi di atas Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dikenakan MDR 0,3%, dengan masa berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri.
- b. Akselerasi QRIS melalui (i) implementasi kebijakan QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai) bersama dengan industri, (ii) implementasi uji coba QRIS antarnegara dengan Singapura, dan (iii) perluasan akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara *targeted* kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya, antara lain melalui penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional dan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) dalam rangka Perayaan Kemerdekaan RI.
- c. Peningkatan *monitoring* atas implementasi QRIS baik QRIS TUNTAS maupun MDR QRIS untuk usaha mikro.
- d. Penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah, khususnya KKI Pemda, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, serta melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan daya jangkauan yang lebih luas.

Bank Indonesia juga terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat kerja sama internasional serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas dengan berkoordinasi

dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk (i) menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan, dengan lima fokus pencapaian, yaitu terkait bauran kebijakan, *local currency transaction*, *regional payment connectivity*, inklusi keuangan, dan *strengthening ASEAN finance process*, dan (ii) melakukan diseminasi *deliverable* ASEAN di bawah Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia. Sinergi erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya juga terus diperkuat untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia juga melanjutkan pendalaman pasar uang dan valas, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut diperkuat dengan perluasan instrumen lindung nilai dan perluasan kerja sama dengan sejumlah bank sentral untuk penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT) dalam perdagangan, investasi, pasar keuangan, dan perbankan, serta transaksi pembayaran antarnegara, dengan dukungan Satuan Tugas Nasional LCT.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dari dampak rambatan tingginya ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat, termasuk penguatan program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP dan TPID, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan KSSK diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.





 **BANK INDONESIA**



Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan



BAB 3

Transformasi Kelembagaan Bank Indonesia





Peluncuran Standar Nasional Fitur Baru QRIS untuk Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (QRIS TUNTAS) di Jakarta

Bank Indonesia memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. UU P2SK memberikan landasan hukum yang kuat bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dalam mengawal perekonomian nasional. Pada prinsipnya, hal-hal yang tertuang dalam UU P2SK telah sejalan dengan praktik yang telah dilakukan Bank Indonesia saat ini, namun diperlukan pelaksanaan transformasi yang menyeluruh guna memastikan kesesuaian praktik yang telah dilakukan Bank Indonesia dengan amanat UU.

Dalam jangka menengah (2023-2028), agenda transformasi Bank Indonesia mencakup tujuh strategi. *Pertama*, penguatan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sesuai UU P2SK. *Kedua*, penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. *Ketiga*, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) dan Rupiah Digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Keempat*, pendalaman pasar uang untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (*green and sustainable finance*). *Kelima*, sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong hilirisasi serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. *Keenam*, penguatan kebijakan dan sinergi dengan Pemerintah dan mitra strategis lain untuk kerja sama dan hubungan internasional. *Ketujuh*, transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang

baik, dan akuntabilitas Bank Indonesia. Transformasi Bank Indonesia dilakukan secara menyeluruh sesuai prioritas/rencana di area (i) kebijakan, (ii) organisasi dan proses kerja, (iii) SDM dan budaya kerja, serta (iv) digital.

3.1. Transformasi Kebijakan

Transformasi kebijakan Bank Indonesia terus dilanjutkan dan diperkuat sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. Pada triwulan III 2023, transformasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan guna memperkuat kerangka bauran kebijakan serta penguatan di masing-masing area kebijakan. Transformasi kebijakan mencakup penguatan berbagai ketentuan, instrumen, infrastruktur, dan koordinasi. Transformasi kebijakan ditempuh dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar, mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Seluruh program transformasi dilakukan dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional.

3.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

1) Penguatan Kerangka dan Pengaturan Bauran Kebijakan Utama dan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia terus melakukan penguatan bauran kebijakan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis terkini. Penguatan dimaksud

ditempuh antara lain melalui penyempurnaan dan penguatan Bauran Kebijakan Utama (BKU) agar selaras dengan amanat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Penyempurnaan BKU tersebut ditujukan untuk (i) memastikan perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dan (ii) memberikan landasan hukum bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui pengaturan kerangka BKU Bank Indonesia.

Dalam kaitan ini, ketentuan tentang BKU akan mengintegrasikan tiga kebijakan utama, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, didukung oleh kebijakan pendukung untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perumusan dan pelaksanaan BKU dimaksud akan dilandasi oleh Prinsip Sistem Tata Kelola Bank Indonesia, yakni IKKAT.

Bank Indonesia juga tengah memperkuat kerangka kebijakan moneter agar selaras dengan BKU dan lingkungan strategis terkini. Perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal, serta kebutuhan akan penguatan fungsi utama Bank Indonesia di bidang moneter memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan moneter dan ketentuan terkait. Penyempurnaan ketentuan tentang kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia tersebut akan menjadi acuan utama bagi pembentukan peraturan terkait pelaksanaan kebijakan moneter dan sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia.

2) Penguatan Kerangka dan Kebijakan Strategis Pengelolaan Cadangan Devisa

a) Penguatan Kerangka dan Kebijakan Strategis Pengelolaan Cadangan Devisa

Bank Indonesia terus melanjutkan proses reformasi pengelolaan cadangan devisa melalui penguatan kerangka kerja (*framework*) dan kebijakan strategis yang berfokus pada upaya menjaga nilai cadangan devisa (*preserved value*). Di samping itu, Bank Indonesia juga tetap memperhatikan ketersediaan dana likuiditas dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing. Pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip keamanan (*security*) dan kesiagaan (*liquidity*), serta tanpa mengabaikan

prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (*profitability*).

Penguatan kebijakan strategis pengelolaan cadangan devisa dilakukan melalui proses evaluasi secara berkala atas *Strategic Asset Allocation* (SAA). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga cadangan devisa agar tetap pada level yang dianggap cukup sesuai dengan indikator yang ditetapkan, di tengah kondisi gejolak pasar keuangan global. Selain itu, dalam rangka pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia secara berkala berkoordinasi dengan Pemerintah antara lain terkait monitoring DHE dan bekerja sama dengan bank sentral di kawasan melalui program Kerjasama Keuangan Internasional (KKI).

Pada triwulan III 2023, dalam rangka memastikan implementasi penguatan pengelolaan cadangan devisa sejalan dengan prinsip efektif, efisien, dan kepatuhan, Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan terkait pengelolaan cadangan devisa beserta ketentuan turunannya antara lain pengaturan terkait Pemantauan Kecukupan Cadangan Devisa dan Pedoman Pelaksanaan Transaksi Devisa.

b) Penguatan Bank Indonesia *Front Office Middle Office Back Office* (BI-FOMOBO) untuk mendukung Pengelolaan Cadangan Devisa yang Optimal

Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan cadangan devisa melalui implementasi kerangka kerja (*framework*) yang berfokus pada menjaga nilai (*preserved value*) cadangan devisa. Dalam rangka mendorong penguatan pengelolaan cadangan devisa dimaksud, Bank Indonesia melakukan transformasi pengelolaan cadangan devisa yang ditunjukkan melalui implementasi beragam instrumen keuangan. Perluasan *deferred products* dan skema transaksi seperti *repurchase agreement* merupakan bagian dari agenda pengembangan saat ini. Peningkatan kompleksitas atas instrumen keuangan perlu diiringi dengan kemampuan perangkat teknologi guna mendukung proses transaksi, pembukuan, dan kecukupan informasi.

Oleh sebab itu, pada 2023 Bank Indonesia melakukan penguatan BI-FOMOBO yang telah diimplementasikan sejak 14 Oktober 2019. BI-FOMOBO merupakan salah satu perwujudan transformasi digital dalam manajemen pengelolaan tresuri Bank Indonesia, termasuk di

dalamnya pengelolaan moneter dan pengelolaan cadangan devisa. Penguatan BI-FOMOBO dilakukan mempertimbangkan perlunya *agility*, adopsi teknologi, dan *sense of urgency* yang tinggi dalam mentranslasikan sisi kebijakan ke dalam operasional bisnis harian melalui *platform* sistem aplikasi. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan kemudahan bertransaksi, menjadi sarana pembelajaran, sekaligus menjaga *governance* proses bisnis pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia.

Pada triwulan III 2023, penguatan BI-FOMOBO untuk pengelolaan cadangan devisa dilakukan melalui implementasi *portfolio hierarchy* sehubungan dengan penyesuaian *book asset* pengelolaan devisa. Ke depan, penguatan BI-FOMOBO akan dilakukan untuk memperluas cakupan instrumen dalam rangka mendukung terjaganya level cadangan devisa.

3) Integrasi Pengelolaan Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan melalui Pendekatan Holistik 3I (*Integrated, Interoperable, dan Interconnected*)

a) Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)

Bank Indonesia terus melakukan inovasi kebijakan moneter termasuk untuk memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar Rupiah tetap stabil. Oleh karenanya, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan suku bunga melalui penerbitan instrumen moneter SRBI. SRBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia. Penerbitan SRBI yang *pro-market* bertujuan untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik *portfolio inflows*, serta optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai *underlying*.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait SRBI dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 tahun 2023 tentang Operasi Moneter dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 8 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka. Bank Indonesia juga melakukan rangkaian sosialisasi instrumen SRBI kepada berbagai pihak antara lain perbankan, *market operator*, manajer investasi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, pialang pasar

uang, penilai harga efek, asosiasi pelaku pasar, pers, calon investor dan otoritas terkait.

Pasar menyambut baik penerbitan SRBI ini yang tecermin dari tingginya penawaran dibandingkan dengan target (*oversubscribed*). Tingginya minat pelaku pasar terhadap SRBI di pasar perdana sejalan dengan likuiditas yang masih memadai. Selain itu, perkembangan SRBI terkini juga telah diikuti dengan pembelian oleh investor di pasar sekunder (termasuk nonresiden).

b) Implementasi *Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE)*

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen TD Valas DHE sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh eksportir untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia. Implementasi TD Valas DHE merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap kebijakan pengelolaan DHE di dalam negeri. Instrumen TD Valas DHE merupakan bagian dari penguatan operasi moneter valas yang dilakukan melalui perluasan mekanisme transaksi antara Bank Indonesia dengan bank. Penempatan DHE oleh eksportir dalam TD Valas DHE dilakukan dalam bentuk *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, instrumen TD Valas DHE dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk agunan kredit Rupiah dari bank. Selanjutnya, oleh bank, agunan tersebut digunakan sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai bank dengan Bank Indonesia, serta digunakan oleh bank untuk transaksi *swap* bank dengan Bank Indonesia untuk kepentingan eksportir dalam bentuk pengalihan dari transaksi TD Valas DHE menjadi transaksi *swap* bank ke Bank Indonesia.

Pada triwulan III 2023, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA). Untuk mendukung PP tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 7 Tahun 2023 dan PADG No. 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Selain itu, Bank Indonesia juga terlibat secara aktif dalam serangkaian kegiatan sosialisasi yang dikordinasikan oleh Pemerintah mengenai implementasi kebijakan PP DHE SDA, termasuk TD Valas DHE sebagai salah satu pilihan instrumen penempatan DHE SDA. Sosialisasi dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait



Seminar Nasional "Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Hilirisasi" di Jakarta

meliputi Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator penyelenggara, dan ditujukan kepada perbankan, perusahaan eksportir, dan asosiasi perusahaan di berbagai kota di Indonesia.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah dimaksud, terdapat peningkatan penempatan pada TD Valas DHE secara signifikan mencapai sebesar 267,74%. Selanjutnya, sejak awal implementasi TD Valas DHE, telah dilakukan penambahan jumlah *Appointed Bank* dari 20 bank menjadi 34 bank.

3.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

1) Penguatan Kerangka dan Fitur Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Bank Indonesia mendorong kebijakan penyaluran kredit/pembiayaan dari sisi penawaran perbankan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang berbasis likuiditas, salah satunya melalui implementasi KLM.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI mengenai KLM beserta PADG mengenai peraturan pelaksanaan KLM sebagai dasar hukum penerapan kebijakan KLM bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan KLM yang berlaku

sejak tanggal 1 Oktober 2023 tersebut merupakan bentuk penyempurnaan kebijakan insentif Bank Indonesia sebelumnya, dengan penguatan antara lain berupa (i) peningkatan besaran insentif untuk mendorong intermediasi, (ii) *refocusing* sektor yang menjadi target intermediasi, dan (iii) penambahan insentif bagi bank yang melakukan intermediasi kepada Ultra Mikro (UMi).

KLM diberikan dalam bentuk pengurangan atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam Rupiah yang dipenuhi secara rata-rata dengan besaran maksimal sebesar 4% secara berjenjang. Pemberian KLM dilakukan oleh Bank Indonesia atas capaian intermediasi bank terkait: (i) kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (yaitu sektor hilirisasi minerba, hilirisasi nonminerba, perumahan, dan pariwisata) dengan besaran pengurangan GWM paling besar 2%, (ii) kredit/pembiayaan inklusif, dengan besaran pengurangan GWM paling besar 1%, (iii) kredit/pembiayaan kepada ultra mikro, dengan besaran pengurangan GWM paling besar 0,5%, dan (iv) kredit/pembiayaan hijau, dengan besaran pengurangan GWM paling besar 0,5%.

2) Pengembangan *Supervisory Technology* (Suptech)

Bank Indonesia terus melakukan pengembangan aplikasi Suptech sebagai *tools* pengawas untuk mewujudkan mekanisme pengawasan yang lebih *agile* dan responsif. Hal ini sebagai respons terhadap lingkungan strategis dan perkembangan teknologi

digital yang pesat, yang berdampak terhadap seluruh area pengawasan Bank Indonesia yang mencakup pengawasan makroprudensial (*dynamic systemic risk surveillance*), pengawasan di bidang moneter, pasar uang, pasar valas, serta pengawasan di bidang sistem pembayaran. Suptech bertujuan untuk mendukung fungsi pengawasan dengan memanfaatkan laporan yang bersumber dari *high frequent data*, termasuk pemanfaatan *big data*. Di samping itu, Suptech juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis pengawasan yang dihasilkan, yaitu tidak hanya bersifat deskriptif, namun mampu menghasilkan analisis yang bersifat diagnostik, prediktif, hingga dapat merumuskan solusi untuk tantangan yang dihadapi (*prescriptive*).

Aplikasi Suptech terdiri dari dua fungsi utama, yaitu *data collection* dan *data analytics*. Implementasi Suptech dari sisi *data collection* antara lain berupa otomasi laporan untuk memperoleh data pelaporan yang terintegrasi (baik dari bank maupun nonbank), pertukaran informasi dengan institusi terkait untuk memperoleh data transaksi pembayaran yang lebih granular dan *high frequency*, penarikan data dari internet (*scraping*) untuk memperoleh data alternatif yang dapat mendukung pengawasan dan identifikasi risiko *idiosyncratic*, serta penguatan manajemen data untuk memastikan kualitas data yang diterima.

Pada triwulan III 2023, telah dilakukan penyusunan *tools* Suptech baik untuk pengawasan makroprudensial maupun sistem pembayaran. Untuk pengawasan makroprudensial, *tool* Suptech yang telah disusun berupa *Early Warning Model* untuk risiko likuiditas dengan menggunakan *machine learning*. Sementara untuk pengawasan sistem pembayaran, *tool* Suptech berupa *Behavior Analysis* dengan menggunakan data RTGS dalam rangka mengidentifikasi perilaku Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Lembaga selain Bank dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP), termasuk *interconnectedness* antar PJP dan PIP. Ke depan, pengembangan dan pemanfaatan *Suptech* sebagai *tools* pengawasan terus dilakukan sejalan dengan Rencana Inovasi dan Transformasi Digital Bank Indonesia 2022 - 2025.

3) Pengaturan dan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

UU P2SK yang ditetapkan pada awal tahun 2023 secara eksplisit memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan keuangan berkelanjutan serta mendorong pembiayaan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal ini, Bank Indonesia terus berinovasi mengoptimalkan pengaturan

makroprudensial untuk memberikan insentif bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan hijau, mengembangkan ekosistem penunjang keuangan berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga guna mendorong implementasi keuangan berkelanjutan.

Bank Indonesia terus memperkuat *awareness* dan kapabilitas internal dalam menilai dan mengelola dampak risiko perubahan iklim terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk melalui *climate stress test*. *Climate stress test* merupakan pendekatan untuk menilai ketahanan bisnis institusi keuangan terhadap berbagai risiko terkait perubahan iklim. Penerapan *climate stress test* bertujuan untuk mengidentifikasi potensi *exposure* dan kerentanan sektor keuangan terhadap risiko perubahan iklim.

Bank Indonesia bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) dan 1in1000, lembaga riset dari Jerman yang bergerak di bidang risiko perubahan iklim, melaksanakan *capacity building* serta riset bersama untuk menelaah ketahanan korporasi sektor energi terhadap risiko transisi perubahan iklim. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Agence Française de Développement, dan konsultan eksternal dalam mengkaji dampak risiko transisi energi terhadap perekonomian Indonesia. Lebih jauh, pada Financial Sector Assessment Program (FSAP) Indonesia 2023/2024, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK, menjajaki masukan atas pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia serta merencanakan program kerja sama *technical assistance* dari IMF khususnya dalam pengembangan metodologi *stress test* perubahan iklim pada konteks Indonesia.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah melakukan *capacity building* terkait *climate stress test* yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan kapabilitas internal dalam menilai dan mengelola dampak risiko perubahan iklim terhadap stabilitas sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia juga akan merumuskan kajian *climate stress test* untuk sektor perbankan Indonesia, dengan target penyelesaian kajian pada tahun 2024.

4) Penguatan Koordinasi dan Sinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Terkait sebagai Tindak Lanjut UU P2SK

a) Revisit Dokumen Kesepakatan dan/atau Mekanisme Koordinasi antara BI-OJK dan BI-LPS

Bank Indonesia dan OJK melakukan *revisit* Keputusan Bersama mengenai kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dan OJK (KB BI-OJK)



Temu Wicara High Level antara Mahkamah Agung RI, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta

sebagai respons atas UU P2SK. Pada Februari 2023, telah dilakukan *high level meeting* yang menyepakati dilakukannya *restructuring* forum koordinasi dan penyesuaian cakupan koordinasi. *Revisit* KB BI-OJK nantinya akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bank Indonesia-OJK (NK BI-OJK). Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia dan OJK tengah melakukan pembahasan intensif draf NK dimaksud. Penandatanganan NK PLJP/PLJPS oleh Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK ditargetkan pada triwulan IV 2023.

Bank Indonesia dan OJK juga melakukan *revisit* KB mengenai kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS). Hal ini untuk merespons adanya perubahan pengaturan mengenai PLJP/PLJPS dalam UU P2SK, termasuk penguatan koordinasi Bank Indonesia dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS. *Revisit* KB PLJP/PLJPS akan dituangkan dalam bentuk NK BI-OJK mengenai kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemberian PLJP/PLJPS (NK PLJP/PLJPS). Pada triwulan III 2023, telah dilakukan pembahasan intensif antara Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penyusunan draf NK dimaksud. Penandatanganan NK PLJP/PLJPS ditargetkan untuk dilakukan pada triwulan IV 2023.

Revisit NK mengenai kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewenang juga dilakukan antara Bank Indonesia dengan LPS (NK BI-LPS). Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia dan LPS telah melakukan *high level meeting* dan menyepakati perubahan NK BI-LPS agar selaras dengan UU P2SK dan kebijakan terkini dari masing-masing lembaga. Proses pembahasan dan penyusunan perubahan NK BI-LPS terus dilakukan secara intensif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023.

Di samping perubahan pada NK, penyesuaian kerja sama juga akan dilakukan secara paralel terhadap beberapa dokumen turunan sebagai pelaksanaan dari NK BI-OJK dan NK BI-LPS antara lain:

- i. *Revisit* Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dan OJK (PKS BI - OJK) mengenai PLJP/PLJPS.
 - ii. *Revisit* petunjuk pelaksanaan Bank Indonesia dan OJK (Juklak BI-OJK) mengenai koordinasi penetapan dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik.
 - iii. Petunjuk pelaksanaan Bank Indonesia dan LPS (Juklak BI-LPS) mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai hubungan operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia.
- b) Koordinasi BI-OJK-LPS terkait Pencegahan dan Penanganan Krisis**

Pada 11-13 September 2023, Bank Indonesia telah melaksanakan Simulasi Krisis Bank Indonesia

(SimkrisBI) 2023 Tahap I untuk menguji kesiapan Bank Indonesia dalam menghadapi serangan siber pada perbankan nasional dan dampaknya terhadap operasional Bank Indonesia. Hasil simulasi tersebut akan menjadi dasar evaluasi terkait kesiapan Standar Operasional Prosedur (SOP), *Decision Making Process* (DMP), dan ketentuan internal Bank Indonesia lainnya dalam mengatasi gangguan operasional yang berasal dari industri atau eksternal.

Menindaklanjuti simulasi tahap I tersebut, Bank Indonesia akan menyiapkan SimkrisBI 2023 Tahap II pada triwulan IV 2023 untuk menguji kesiapan Bank Indonesia dalam memproses pengajuan PLJP, serta menguji kesiapan Bank Indonesia dan LPS dalam mengimplementasikan opsi resolusi melalui pembentukan Bank Perantara. Pelaksanaan simulasi diselenggarakan dengan perkembangan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang telah disempurnakan melalui UU P2SK.

Di samping itu, SimkrisBI Tahap II bertujuan untuk menguji ketentuan yang telah disusun yaitu PBI tentang PLJP/PLJPS berlandaskan koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK, dan menyusun skenario simulasi Bank Perantara. Rangkaian pembahasan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan LPS dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi tentang ketentuan terkait Bank Perantara, serta memastikan keselarasan skenario dengan kondisi *existing* yang mencakup aspek proses administratif dan sistem di kedua lembaga. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan tentang tata cara kerja sama antara Bank Indonesia dan LPS terkait hubungan operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia.

3.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur sistem pembayaran (SP) dalam rangka memastikan infrastruktur yang terintegrasi, terinterkoneksi, dan terinteroperabilitas (3I) guna mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur SP terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi *cross-border* yang lebih cepat, mudah, murah, dan andal.

Pada triwulan III 2023, komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui

kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) diperluas melalui kerja sama dengan State Bank of Vietnam (SBV). Hal ini memperluas kerja sama *existing* RPC antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Kerja sama RPC dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif di antara negara anggota ASEAN. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Perluasan RPC akan terus dilakukan ke negara lainnya di kawasan.

Pengembangan konektivitas SP lintas batas berbasis *fast payment* melalui Proyek Nexus bersama Bank for International Settlements (BIS) masih terus dilanjutkan. Pada triwulan III 2023, tengah dilakukan pembahasan detail aspek skema dan tata kelola, teknologi, bisnis, dan komersial dalam rangka penyusunan *Blueprint Cross Border Payment* melalui *platform* Nexus. Penguatan konektivitas sistem pembayaran juga terus dilakukan di sisi nilai besar melalui pengembangan fitur *multicurrency* pada BI-RTGS Generasi III.

Pasca peluncuran kartu kredit domestik untuk segmen Pemerintah di Indonesia, atau Kartu Kredit Indonesia, Bank Indonesia terus mendorong implementasinya melalui sosialisasi ke sejumlah daerah. Sosialisasi secara luring maupun daring telah dilakukan di Jakarta, Kendari, Denpasar, Palembang, Surabaya, Makassar, Ternate, dan Mamuju.

2) Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung industri SP yang sehat, kompetitif, dan inovatif melalui standardisasi dalam penyelenggaraan SP. Standardisasi SP merupakan bagian dari upaya mewujudkan "Satu Bahasa" ekosistem sistem pembayaran digital yang terus diperluas, antara lain melalui perluasan QRIS dan Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP). Pada 17 Agustus 2023, Bank Indonesia meluncurkan standar nasional QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai (QRIS TUNTAS). Standar Nasional QRIS TUNTAS dikembangkan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Dengan fitur QRIS TUNTAS, pengguna dapat melakukan transfer dana antar pengguna QRIS, serta tarik tunai, dan setor tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) / *Cash Deposit Machine* (CDM) atau agen QRIS TUNTAS. Inisiatif QRIS TUNTAS ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam pengembangan inovasi

fitur QRIS secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi QRIS TUNTAS melengkapi fitur QRIS untuk pembayaran yang telah diimplementasikan sebelumnya yaitu QRIS dengan model *merchant presented mode* dan *consumer presented mode*, serta QRIS Tanpa Tatap Muka, QRIS dengan sumber dana fasilitas kredit, dan QRIS Antarnegara.

Implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand dan Malaysia tumbuh positif. Transaksi QRIS Antarnegara dengan Thailand sampai akhir September 2023 telah mencapai 162 ribu transaksi dengan nominal sebesar Rp69,74 miliar. Sementara itu, QRIS Antarnegara dengan Malaysia telah mencapai 90 ribu transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp28,66 miliar. QRIS Antarnegara terus diperluas melalui dimulainya uji coba (*sandbox*) QRIS Antarnegara Indonesia-Singapura pada 17 Agustus 2023 dengan rencana implementasi pada bulan November 2023. Implementasi SNAP juga terus berjalan yang ditandai dengan pengguna layanan yang semakin terintegrasi. Perluasan standar sistem pembayaran ini akan terus mendukung perluasan konektivitas sistem pembayaran dan konsolidasi antara industri pembayaran.

3) Pengembangan Rupiah Digital

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Rupiah Digital. Pasca penerbitan *Consultative Paper* Tahap I berjudul "Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger" pada 31 Januari 2023, Bank Indonesia mendapatkan berbagai masukan dan tanggapan dari *stakeholder*. Hingga 15 Juli 2023, telah diterima 41 masukan dan tanggapan dari bank, Lembaga Selain Bank (LSB), kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, korporasi non keuangan, lembaga internasional dan individu. Hasil masukan dan tanggapan telah didalami melalui serangkaian diskusi bersama *stakeholder* dan akan menjadi pertimbangan dalam tahapan pengembangan Rupiah Digital. Selanjutnya, Bank Indonesia akan memublikasikan kompilasi hasil masukan, tanggapan, dan diskusi tersebut.

4) Pengelolaan Uang Rupiah yang Lebih Ramah Lingkungan

Transformasi di bidang SP juga diarahkan pada aspek Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang lebih ramah lingkungan. Bank Indonesia memperkuat inisiasi program PUR yang lebih ramah lingkungan. Rekomendasi hasil Kajian Pengembangan Jaringan

Pengolahan Limbah Pemusnahan Uang Rupiah yang Ramah Lingkungan dan Penyusunan *Roadmap* Penurunan Jejak Karbon dalam Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mulai diimplementasikan pada triwulan III 2023.

Sebagai tahapan awal implementasi hasil kajian, khususnya dalam pengolahan limbah racik uang kertas (LRUK) dengan metode *waste to energy* (WTE), Bank Indonesia telah melakukan *proof of concept* (PoC) berupa uji bahan bakar yang dihasilkan dari LRUK di dua lokasi calon *offtaker*, yaitu pabrik semen serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Uji bahan bakar tersebut diperlukan untuk melakukan percobaan terhadap performa kegiatan industri dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari LRUK sekaligus melakukan uji kualitas LRUK secara langsung.

LRUK di pabrik semen diolah dengan cara *co-processing*, yaitu teknik pemakaian kembali limbah suatu industri sebagai substitusi bahan bakar fosil dengan tujuan untuk memanfaatkan nilai energi dan nilai bahan yang masih terkandung dalam limbah tersebut. Kegiatan uji *co-processing* di pabrik semen mencakup tahapan *pre-treatment*, yang meliputi proses *shredding* (pencacahan), *screening* (pengayakan), dan transfer, sampai LRUK diumpankan ke sistem Kiln (ruang pembakaran) semen.

Sementara itu, LRUK di PLTU diolah dengan cara *co-firing* atau teknik substitusi dalam pembakaran, dimana sebagian batu bara yang dijadikan bahan bakar diganti dengan menggunakan LRUK. Kegiatan uji *co-firing* di PLTU dilakukan dengan menggunakan LRUK dalam volume $\pm 138,6$ ton atau sekitar 4% dari kebutuhan harian batu bara PLTU. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan saat uji *co-firing*, diperoleh informasi bahwa LRUK dapat digunakan sebagai bahan bakar substitusi batu bara di PLTU. Sebagai tindak lanjut hasil uji *co-processing* dan *co-firing* di dua perusahaan tersebut, Bank Indonesia akan menjajaki potensi kerja sama dengan calon mitra *offtaker* lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menyukseskan program pengelolaan LRUK yang bermanfaat dan berkelanjutan.

5) Koordinasi dalam rangka Penguatan dan Perluasan Sinergi dengan Industri serta Kelembagaan PUR

Transformasi di bidang SP juga diarahkan pada aspek perluasan sinergi dengan industri serta kelembagaan PUR yaitu lembaga atau instansi terkait yang terlibat dalam pengelolaan uang Rupiah. Bank Indonesia melakukan penguatan sinergi dengan industri dan kelembagaan PUR sebagai bagian dari upaya reprioritisasi dan penajaman program kerja untuk

mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan, baik internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian *Destination Statement Blueprint* Pengelolaan Uang Rupiah 2025.

Untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya di wilayah NKRI, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan industri PUR. Salah satunya melalui penguatan standardisasi infrastruktur pengolahan dan resirkulasi uang yang digunakan oleh industri PUR agar memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Standardisasi ini mencakup standar sortasi kualitas dan keaslian uang pada mesin sortasi, serta standar keaslian uang pada mesin *cash deposit machine* (CDM) dan *cash recycle machine* (CRM). Pada triwulan III 2023, inisiasi ini akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan penyusunan *consultative paper*.

Penguatan sinergi dengan industri dan kelembagaan PUR juga dilakukan melalui koordinasi dengan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) dalam rangka penanggulangan peredaran uang palsu. Koordinasi yang dilakukan antara lain untuk menanggulangi penjualan uang palsu di media *online* melalui penyampaian informasi kepada kementerian terkait untuk pemblokiran konten. Upaya ini diharapkan dapat menekan peredaran uang palsu yang dipasarkan melalui media *online*.

3.1.4. Transformasi di Bidang Pendukung Kebijakan Utama

1) *Regulatory Reform* Pasar Uang dan Pasar Valas

Setelah menerbitkan PBI No. 6 tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia melanjutkan reformasi ketentuan di PUVA melalui penerbitan PADG No. 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* (SRO) di PUVA pada 29 September 2023. Ketentuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut terkait tugas, kewenangan, dan prosedur bagi pelaku transaksi di PUVA, profesi *treasury dealer*, asosiasi profesi di bidang *treasury*, dan lembaga sertifikasi profesi dalam mendukung peningkatan kualitas pelaku PUVA.

Partisipan atau pelaku transaksi memegang peran krusial dalam menentukan arah kebijakan pengembangan pasar keuangan domestik melalui pengembangan ekosistem 3P+1I, yaitu Produk, Partisipan, *Pricing* (harga), dan Infrastruktur Pasar Keuangan. Pelaku transaksi yang kompeten dan berintegritas akan menjadi *key success factor*

dalam mewujudkan PUVA yang kredibel, likuid, transparan, aman, dan andal selaras dengan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. Oleh karena itu, PADG dimaksud memberikan pedoman tentang pengembangan dan penguatan kompetensi pelaku transaksi melalui kewajiban kepemilikan sertifikat *treasury* dan kepatuhan atas penerapan kode etik pasar yang selaras dengan praktik terbaik secara internasional.

Dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Bank Indonesia juga mengatur mekanisme pendaftaran bagi penyelenggara sertifikasi profesi, termasuk mekanisme pendaftaran bagi individu profesi di bidang *treasury*. Lebih lanjut, untuk meningkatkan peran pelaku transaksi sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam pengembangan PUVA, telah ditetapkan SRO asosiasi PUVA yang mewakili institusi untuk mendorong arah pengembangan pasar keuangan ke depan bersifat *industry led*.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dan komunikasi dengan OJK, LPS, dan International Swaps and Derivatives Association (ISDA) dalam rangka memperoleh ISDA *netting opinion* untuk Indonesia. Menindaklanjuti hasil koordinasi dan komunikasi tersebut, Bank Indonesia akan menerbitkan PBI tentang Penerbitan Instrumen dan Transaksi di Pasar Uang yang salah satunya memuat mengenai standar dan mekanisme *settlement finality* dan *close-out netting*. Hal ini sebagai upaya untuk menguatkan keyakinan mengenai penerapan *close-out netting* khususnya pasca insolvensi sesuai sistem hukum Indonesia. Penerapan *close-out netting* tersebut diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar keuangan Indonesia.

2) Pembentukan dan Pengembangan *Central Counterparty* untuk Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT)

Bank Indonesia senantiasa mendorong percepatan pembentukan CCP SBNT. CCP SBNT merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan untuk transaksi di pasar uang dan pasar valas antarbank. Dalam rangka mendukung kerangka manajemen risiko CCP SBNT yang komprehensif, Bank Indonesia berkoordinasi dengan calon CCP SBNT untuk memastikan pengembangan CCP SBNT sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional yang dikeluarkan CPMI-IOSCO yaitu *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI). Pengembangan CCP SBNT ke depan juga dilakukan dengan memperhatikan aspek 3I dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, serta mendukung

pengembangan Rupiah Digital dan Digital Securities (*Central Bank Digital Currency - CBDC Platform*).

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai calon penyelenggara CCP SBNT. Koordinasi bertujuan untuk memastikan kesiapan implementasi CCP SBNT secara sistem maupun operasional telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional, antara lain konektivitas sistem CCP SBNT dengan *piloting member*, serta BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai sistem setelmen. Selain itu, Bank Indonesia masih melanjutkan koordinasi dalam rangka finalisasi NK antara Bursa Efek Indonesia (BEI), perbankan, dan Bank Indonesia tentang penyertaan modal kepada CCP SBNT. Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK mengenai pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antarbank yang tidak diklirinkan melalui CCP SBNT (*Non Centrally Cleared Derivative/NCCD*) maupun terkait *capital requirements bank*.

3) Pengembangan Instrumen Repo

Pengembangan repo merupakan salah satu *key deliverable* dalam BPPU 2025. Pengembangan repo terus dilanjutkan, antara lain melalui penguatan pengaturan repo di pasar uang sebagai bagian dari tindak lanjut *regulatory reform* UU P2SK dan pelaksanaan *targeted capacity building* kepada bank. Prinsip-prinsip penguatan pengaturan repo akan diatur dalam PBI Penerbitan Instrumen dan Transaksi Pasar Uang (PITPU). Pengaturan repo dalam PBI PITPU mencakup: (i) pengaturan produk, meliputi penggunaan kontrak dan market standar, (ii) pengaturan pelaku, meliputi penyesuaian pengaturan klasifikasi pelaku di pasar uang dengan pelaku di pasar modal, (iii) pengaturan harga, meliputi pengaturan penggunaan sumber harga yang kredibel dan sarana penyediaan informasi harga, serta (iv) pengaturan infrastruktur di pasar repo yang digunakan dalam transaksi repo.

Sementara itu, pengembangan repo dari sisi harga dilakukan dalam bentuk penyediaan informasi harga repo pada tenor panjang seiring peningkatan likuiditas repo tenor *non-overnight*. Adapun pengembangan infrastruktur pendukung repo dilakukan untuk sistem transaksi, *triparty* repo, dan CCP repo. Seiring dengan upaya pengembangan repo tersebut, pada triwulan III 2023 telah terdapat pelaku pasar yang melakukan repo jangka panjang (*repo to maturity*) yang memiliki suku bunga mengambang dengan merujuk pada Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA).

4) Pengembangan Instrumen Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)

Pengembangan DNDF merupakan salah satu *key deliverable* pengembangan instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing sesuai dengan BPPU 2025. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan rangkaian kegiatan sosialisasi kepada *stakeholder* serta diskusi dengan perbankan dan korporasi untuk mengomunikasikan kebijakan pengembangan instrumen lindung nilai (*hedging*) dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar, termasuk melalui instrumen DNDF. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas survei kepada perbankan dan korporasi yang dilakukan untuk memperoleh masukan dalam rangka pengembangan transaksi lindung nilai tukar di pasar domestik.

Pengembangan DNDF juga dilakukan terintegrasi dengan pengembangan *framework Local Currency Transaction* (LCT). Dalam skema LCT, Bank Indonesia turut mendorong penggunaan derivatif nilai tukar, termasuk DNDF dalam kegiatan transaksi perdagangan dan investasi. Saat ini, transaksi DNDF sudah dapat dilakukan dalam skema LCT dengan negara mitra tertentu, yaitu Malaysia, Jepang, dan China. Dalam rangka mendukung pengembangan DNDF di dalam skema LCT, Bank Indonesia telah menerbitkan Kurs Acuan Non-USD secara harian yang menjadi kurs *fixing* dari transaksi DNDF. Saat ini sudah tersedia 14 kurs acuan non USD yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara rutin melalui sarana *website* dan *market operator* (antara lain Bloomberg dan Refinitiv).

Dalam rangka mendukung persiapan pengembangan CCP, Bank Indonesia telah menyelesaikan asesmen pengaturan standarisasi dan *mandatory clearing* transaksi melalui ETP dan CCP. DNDF dan repo menjadi salah satu instrumen yang akan diusulkan untuk mengikuti *mandatory clearing* melalui CCP. Selanjutnya, dalam rangka asesmen *regulatory reform* transaksi di pasar valas, termasuk DNDF, Bank Indonesia melakukan rangkaian koordinasi dengan otoritas maupun pelaku pasar dalam rangka penyesuaian ketentuan di pasar valas dengan mandat UU P2SK dan kebijakan Bank Indonesia lainnya. Penguatan pengaturan transaksi di pasar valas, termasuk DNDF diharapkan dapat memperkuat *supply* dan *demand* serta fleksibilitas pelaku pasar dalam transaksi DNDF.

5) Upaya Mendorong UMKM Naik Kelas dan Go Global melalui Sinergi dan Digitalisasi

Salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan serta perlindungan



Talkshow Strategi Akselerasi UMKM Go Export dalam rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2023 di Jakarta

konsumen adalah dukungan kolaborasi yang erat dan sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia secara konsisten mengakselerasi berbagai dukungan bagi UMKM agar semakin produktif dan kontributif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi tersebut juga dilakukan untuk mendorong transformasi UMKM menjadi semakin inovatif, kreatif, dan adaptif untuk mendorong terwujudnya UMKM Go Digital dan UMKM Go Export.

Dukungan terhadap penguatan kinerja ekspor juga dilakukan Bank Indonesia melalui penerapan dua strategi utama, yaitu: (i) *pull strategy (market driven)* untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan (ii) *push strategy* melalui fasilitasi penguatan kapasitas UMKM. Peran Bank Indonesia dalam implementasi *pull strategy* antara lain berupa fasilitasi kurasi dan promosi perdagangan yang *selected* dan *targeted*, *business matching*, serta pengembangan *trading house*. Strategi tersebut perlu didukung dengan penguatan kapasitas UMKM melalui *push strategy*, antara lain melalui penyusunan modul ekspor, penajaman *e-catalogue*, *capacity building*, dan pendampingan. Implementasi kedua strategi utama tersebut melibatkan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah dan 5 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri, serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam rangka memperkuat upaya pendampingan, Bank Indonesia telah menerbitkan modul “Panduan Persiapan UMKM Go Global”. Modul yang disusun bersama lembaga penelitian salah satu universitas negeri ini ditujukan kepada pembina dan fasilitator UMKM, serta bagi UMKM dalam mempersiapkan diri untuk memasuki pasar global dengan fokus penguatan pada aspek-aspek

5K (Kualitas, Kuantitas, Kapasitas, Kontinuitas, dan Kemasan), dan 2S (Standardisasi dan Sertifikasi).

Dalam mendorong efektivitas peningkatan kinerja UMKM ekspor, Bank Indonesia mengembangkan pembentukan ekosistem UMKM ekspor berbasis *web* (hub ekspor) sebagai salah satu *flagship* program di tahun 2023 yang bertujuan menyediakan *repository* informasi panduan ekspor, pelatihan, *event* akses pasar luar negeri, dan fasilitasi dalam rangka *link and match* kebutuhan pasar dengan ketersediaan produk UMKM.

Selanjutnya dalam rangka penguatan UMKM Go Digital, Bank Indonesia secara konsisten mendorong UMKM agar dapat beradaptasi dan bertransformasi untuk meningkatkan daya saingnya baik di pasar domestik maupun global. Upaya digitalisasi UMKM antara lain dilakukan melalui program edukasi dan fasilitasi *onboarding* oleh 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Bangga Berwisata #diIndonesiaAja (BBWI). Di samping mendorong UMKM agar masuk dalam ekosistem *e-commerce*, Bank Indonesia juga melaksanakan program *onboarding* UMKM unggulan, dengan harapan UMKM yang telah memiliki akun pemasaran *online* mampu bertahan dan berkembang secara lebih optimal.

Pemanfaatan inovasi dan teknologi berbasis *internet of things* juga dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan kinerja kluster pangan yang diarahkan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi. Hal ini dilakukan melalui replikasi *best practice* kluster pangan dari hulu (budi daya) ke hilir (pengolahan pasca panen

dan kemitraan dengan *offtaker*/industri). Digitalisasi (*digital farming*) dilakukan secara *end-to-end*, baik untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya, maupun fasilitasi akses pemasaran.

6) Penguatan Kebijakan Pelindungan Konsumen

Tren digitalisasi telah memengaruhi seluruh aspek perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional termasuk di sektor keuangan. Tuntutan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman meningkat seiring dengan adanya layanan keuangan serba *seamless* yang memanjakan konsumen. Seiring dengan kemudahan layanan keuangan yang diperoleh, permasalahan yang dihadapi oleh konsumen di era ekonomi keuangan digital ini semakin kompleks dan rumit. Hal inilah yang mendasari diperlukannya transformasi kebijakan termasuk penyelenggaraan pelindungan konsumen yang lebih *massive, technology based, responsive, dan consumer centric* (MATRIC).

Pada triwulan III 2023, sebagai respons dari UU P2SK yang mengamanatkan adanya penguatan terhadap aspek pelindungan konsumen keuangan di era digital, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap peraturan pelaksana PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang telah diterbitkan pada triwulan II 2023. Penguatan dimaksud berupa penyusunan peraturan terkait dan peraturan pelaksanaan yang mendukung implementasi PBI Pelindungan Konsumen Bank Indonesia ke depan.

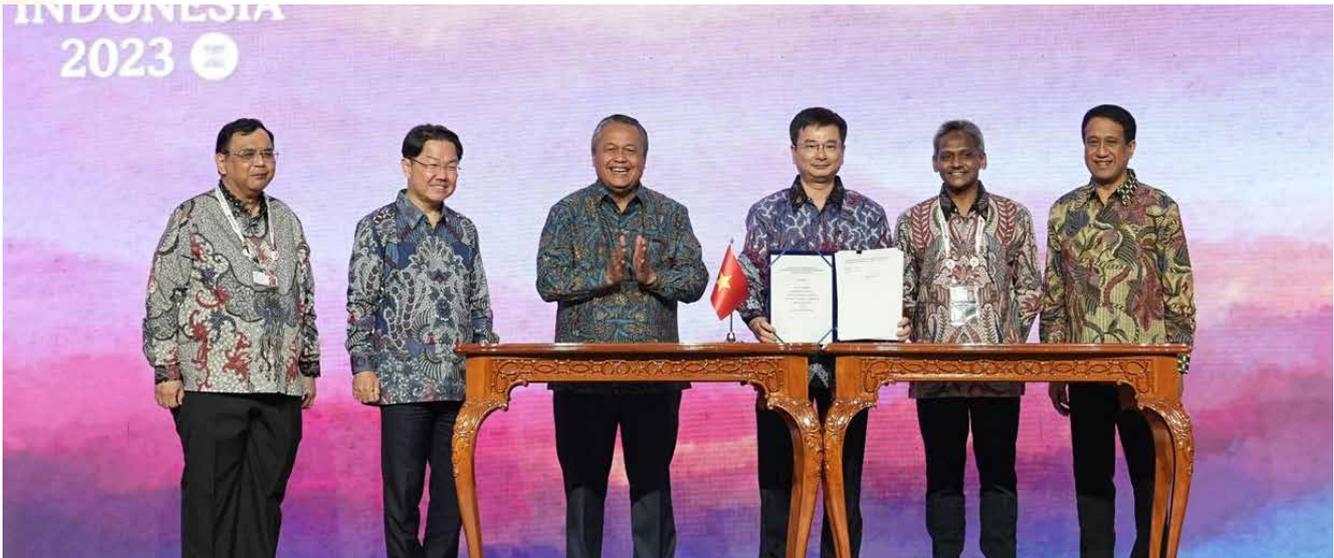
Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan Survei Nasional Pelindungan Konsumen yang dilakukan terhadap 13.666 responden di 34 provinsi. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk: (i) memperoleh gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap sistem pembayaran (APMK dan Uang Elektronik), (ii) mengukur efektivitas dari implementasi kebijakan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang efektif, (iii) memperoleh masukan dalam penyusunan strategi edukasi Perlindungan Konsumen Bank Indonesia secara *targeted*, dan (iv) memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait dalam menyusun strategi nasional pelindungan konsumen. Berdasarkan hasil survei rata-rata Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2023 sebesar 64,67% yang masuk dalam kategori “Kritis”, yaitu konsumen mampu dan berani menyampaikan/mengadukan pendapat/masalah ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi atau adanya beban berlebih atas kewajibannya, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya.

7) Penguatan Ekosistem Jaminan Produk Halal

Bank Indonesia melanjutkan upaya akselerasi penguatan ekosistem jaminan produk halal, baik penguatan ekosistem sisi hulu maupun sisi hilir. Dari sisi hulu, akselerasi ekosistem jaminan produk halal antara lain ditempuh melalui fasilitasi sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH) guna memberikan jaminan kehalalan bahan baku daging. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia juga mulai melakukan replikasi fasilitasi sertifikasi halal bagi RPH sebagai bagian dari perluasan penguatan ekosistem jaminan produk halal dari sisi hulu di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, Bank Indonesia sedang melakukan kajian terkait strategi pengembangan RPH di Indonesia. Hasil kajian tersebut akan menjadi pedoman bagi replikasi fasilitasi sertifikasi halal bagi RPH di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga berkolaborasi bersama salah satu universitas negeri di Jakarta melakukan fasilitasi sertifikasi halal kepada 30 juru sembelih halal (JULEHA) untuk mendukung proses sertifikasi halal bagi RPH.

Dalam upaya akselerasi penguatan ekosistem jaminan produk halal di sisi hilir, progres inisiasi program Toko Bahan Baku Halal (TOBAKU Halal) telah diuji coba di tiga pondok pesantren dari HEBITREN wilayah Jawa Timur. Selain itu, juga dilakukan perluasan uji coba TOBAKU Halal pada tujuh komunitas perempuan Indonesia dan Halal Mart di salah satu universitas negeri. Bank Indonesia juga telah mencanangkan program pengembangan TOBAKU Halal digital melalui *e-commerce* untuk mendukung ekosistem jaminan produk halal di sisi hulu dan hilir, khususnya dalam memperluas kemudahan akses produk bahan baku halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta mendukung literasi masyarakat perihal ekosistem jaminan produk halal. Saat ini, *landing page* TOBAKU Halal digital telah tersedia di dua *e-commerce*, dan terus dilakukan aktivasi *campaign* TOBAKU Halal sejak September 2023. Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus keterlibatan *e-commerce* dalam pengembangan ekosistem produk halal di Indonesia. Kemudahan akses terhadap bahan baku halal diharapkan dapat mengakselerasi proses sertifikasi halal sehingga dapat mendukung tercapainya target Pemerintah yaitu 1 juta sertifikasi halal pada 2023.

Bank Indonesia juga tengah melakukan upaya penguatan sistem informasi SIHALAL sebagai *platform* yang digunakan untuk mendaftarkan dan memantau progres dari pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, upaya penguatan ekosistem jaminan produk halal juga dilakukan melalui pelaksanaan *piloting halal traceability system* yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Inisiatif Bank



Penandatanganan Nota Kesepahaman Perluasan Kerja Sama Konektivitas Sistem Pembayaran Kawasan (RPC) oleh State Bank of Vietnam (SBV) dalam rangkaian acara ASEAN Leaders Summit di Bali

Indonesia bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan kementerian/ lembaga terkait bertujuan untuk meminimalisir permasalahan *asymmetric information* tentang produk berbahan baku daging dari Indonesia yang menyebabkan pelaku usaha sulit melakukan penetrasi ke pasar mancanegara. Saat ini, sedang dilakukan proses pembentukan *halal traceability system* berkolaborasi dengan salah satu universitas negeri di Indonesia.

8) Pengembangan Model Bisnis *Investment Account*

Bank Indonesia tengah mengembangkan model bisnis *investment account* selaras dengan amanat UU P2SK pasal 19 ayat 1 yang memberikan perluasan fungsi perbankan syariah melalui penghimpunan dana investasi yang dipisah dari tabungan. Pengembangan model bisnis *investment account* merupakan salah satu cara untuk mendiversifikasi produk perbankan syariah melalui produk perbankan yang unik dan mengedepankan prinsip *risk sharing*, serta meminimalisir risiko *miss-match*. Adanya perluasan usaha perbankan syariah melalui *investment account*, diharapkan dapat mendukung SSK, khususnya melalui peningkatan stabilitas perbankan syariah.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali *focus group discussion* (FGD) terkait pengembangan model bisnis *investment account* dengan *stakeholder* terkait, antara lain OJK, LPS, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan perbankan syariah, serta melakukan studi banding dengan bank sentral dan pelaku usaha di Uni Emirat Arab. Adapun hasil yang diperoleh dari pembahasan tersebut antara lain informasi terkait fitur,

karakteristik, risiko, serta perlakuan dan/atau insentif sesuai kewenangan lembaga.

9) Penguatan Kesepakatan *Regional Payment Connectivity* (RPC)

Bank Indonesia terus mendorong upaya perluasan kerja sama dan implementasi *Regional Payment Connectivity* (RPC) di kawasan ASEAN dan beberapa negara non-ASEAN lainnya. Pada triwulan III 2023, kerja sama diperluas dengan State Bank of Vietnam (SBV) yang telah sepakat bergabung dalam kerja sama konektivitas pembayaran RPC. Penandatanganan amandemen NK dilakukan di sela-sela Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta, yang disaksikan oleh BNM, BSP, MAS, BOT, dan Bank Indonesia. Perluasan kerja sama dimaksud merupakan tindak lanjut dari mandat Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-9 serta menjadi salah satu capaian prioritas Keketuaan Indonesia ASEAN 2023.

Kerja sama konektivitas sistem pembayaran kawasan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN, termasuk pada sektor pariwisata dan jasa lainnya. Perluasan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM, yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, penguatan konektivitas sistem pembayaran diharapkan dapat memberikan insentif untuk meningkatkan perdagangan dan remitansi di kawasan.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari *ASEAN Leader's Declaration on Advancing RPC* yang disepakati oleh para



Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Satuan Tugas Nasional *Local Currency Transaction* di Jakarta

Pemimpin negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN (Mei 2023) di Labuan Bajo, Bank Indonesia menyusun *roadmap* perluasan kerja sama RPC untuk negara ASEAN lainnya dan didiskusikan melalui *Working Committee on Payment and Settlement System (WC-PSS)*. Pada pembahasan di WC-PSS, ASEAN menyepakati *roadmap* RPC untuk mencakup semua negara ASEAN dan diharapkan seluruh negara ASEAN telah bergabung dalam RPC pada tahun 2025. Penyusunan *roadmap* dilakukan sejalan dengan rencana pembayaran digital lintas batas yang saling terhubung di kawasan pada tahun 2025. *Roadmap* perluasan kerja sama RPC tersebut telah mendapat dukungan (*endorsement*) pada pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-10 pada 25 Agustus 2023.

10) Penguatan Kerja Sama *Local Currency Transaction (LCT)*

Dalam rangka memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mendorong upaya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Bank Indonesia, BNM, dan BoT menyepakati untuk memperkuat kerja sama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Thailand, Indonesia dan Malaysia, serta Thailand dan Malaysia, yang telah diimplementasikan sejak 2018. Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan mata uang lokal pada transaksi lintas batas yang lebih luas dari cakupan perdagangan dan investasi langsung (*direct investment*), serta sinerginya dengan inisiatif sistem pembayaran lintas negara untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal yang lebih mudah diakses dan efisien.

Pada triwulan III 2023, kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Bank Negara Malaysia, dan Gubernur Bank of Thailand di sela-sela Pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta pada 25 Agustus 2023. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral antar ketiga negara tersebut yang diyakini akan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas pasar keuangan serta pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal di masing-masing negara.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia juga berhasil menginisiasi penyusunan ASEAN *High Level Principles (HLP) on LCT Framework* sebagai pedoman bagi negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan dan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam kerangka kerja sama LCT. Penyusunan HLP on ASEAN LCT *Framework* merupakan salah satu *deliverables* Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023. Inisiatif tersebut mendapatkan dukungan dari para Gubernur dan Menteri Keuangan negara-negara ASEAN sebagaimana tertuang dalam *Joint Statement of the 10th ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting*. Upaya penguatan LCT mendapatkan respons positif dari para pimpinan negara ASEAN melalui ASEAN *Leaders Declaration* yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN 2023 yang dilaksanakan pada 5-7 September 2023 di Jakarta. Diversifikasi penggunaan mata uang lokal di kawasan ASEAN diharapkan dapat menekan risiko terhadap stabilitas nilai tukar seluruh negara ASEAN, termasuk



10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Jakarta

Rupiah, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan pasar keuangan.

Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT dalam mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra. Pembentukan Satgas Nasional LCT tersebut melibatkan sembilan kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, OJK, dan LPS. Komitmen Satgas Nasional LCT diwujudkan melalui penandatanganan NK tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra, yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, pada 5 September 2023 di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di Jakarta.

Koordinasi yang disepakati antara lain mencakup perumusan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung. Selain itu, koordinasi terkait penerapan kebijakan atau ketentuan di area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara juga menjadi bagian dari kerja sama yang disepakati. Pembentukan Satgas Nasional LCT juga merupakan tindak lanjut dari kolaborasi dan peningkatan peran otoritas pada tataran

nasional sebagai wujud konkrit implementasi ASEAN *High Level Principles* (HLP) LCT framework.

11) Reformasi *Working Committee* di ASEAN

Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif di wilayah ASEAN, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyadari perlunya merevitalisasi mandat dari komite kerja/*working committee* (WC) ASEAN di jalur keuangan. Hal tersebut bertujuan agar WC lebih mudah beradaptasi dan memberikan proses koordinasi yang lancar dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selain itu, seiring dengan persiapan ASEAN untuk menutup babakannya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025, ASEAN perlu lebih tangkas dan mampu merespons setiap tantangan melalui perbaikan kesenjangan dalam mandat WC dan menyelaraskannya dengan strategi ASEAN pasca tahun 2025.

Oleh karena itu, dalam *10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Joint-Statement*, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menyepakati untuk membentuk satuan tugas/*task force* (TF) guna meninjau kembali mandat WC jalur keuangan. Dalam rangka mewujudkan mandat ini, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah mengedarkan rancangan *High Level Guidelines (HLG) on Revisiting Working Committees Mandates – Aligning with Post 2025*. Dokumen tersebut disusun sebagai seperangkat panduan umum yang harus dipertimbangkan oleh seluruh ASEAN Member States (AMS) ketika merumuskan argumen terkait peninjauan kembali mandat WC. HLG ini merupakan dasar bagi seluruh diskusi mendatang sebagai dasar penyusunan

kerangka kerja peninjauan kembali mandat WC oleh TF. Selanjutnya, proses penyusunan dan penyempurnaan HLG tersebut akan melalui sejumlah diskusi dari anggota ASEAN Finance Ministers and Central Bank Deputies-Working Group (AFCDM-WG).

3.2 Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Transformasi organisasi dan proses kerja dilanjutkan untuk mewujudkan organisasi yang kredibel berbasis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan, didukung dengan tata kelola yang baik dan profesional. Pada triwulan III 2023, transformasi tersebut ditempuh melalui sejumlah inisiatif, antara lain:

1) Penguatan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyempurnaan kerangka sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan sebagai wujud komitmen dalam menerapkan tata kelola yang baik dan profesional dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Penyempurnaan kerangka sistem tata kelola juga diarahkan untuk pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam UU P2SK secara lebih efektif, efisien, taat asas, dan dapat dipertanggungjawabkan, di tengah meningkatnya tantangan dan tuntutan terhadap kontribusi Bank Indonesia dalam perekonomian yang lebih luas.

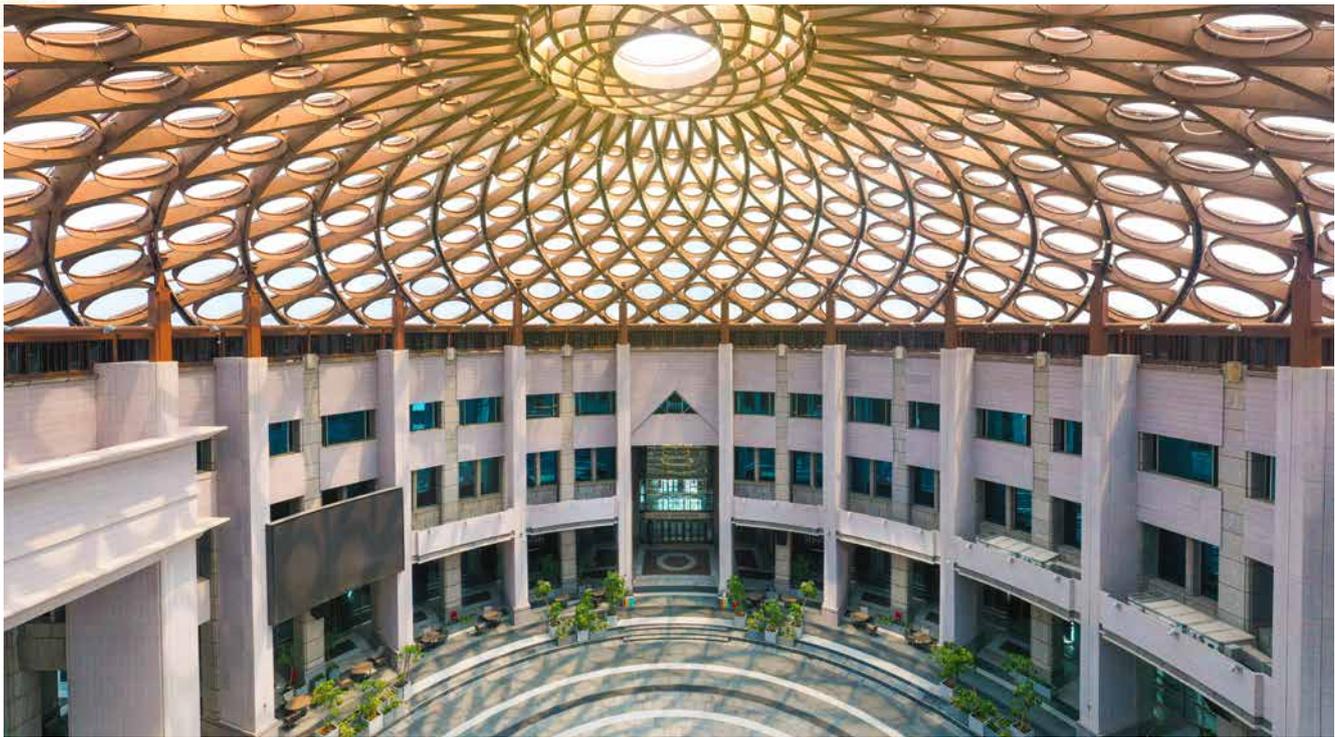
Penguatan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dilandasi pada pemahaman tentang keunikan karakteristik sebuah bank sentral. Bank Indonesia berperan sebagai *policy maker* yang memiliki tanggung jawab kepada publik, sekaligus sebagai *independent service organisation* yang perlu menerapkan praktik pengelolaan lembaga yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* utama, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Sebagai *policy maker*, Bank Indonesia perlu menerapkan tata kelola kebijakan yang kuat (*policy governance*) guna memastikan bahwa perumusan dan penetapan kebijakan telah sejalan dengan norma dan *rules*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai *independent service organisation*, Bank Indonesia perlu menerapkan tata kelola kelembagaan (*institutional governance*) guna memastikan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia dilakukan berdasarkan praktik pengelolaan kelembagaan terbaik (*sound business practices*), dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan sistem tata kelola tersebut dituangkan dalam ketentuan tentang Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia. Dengan diterbitkannya ketentuan tersebut, pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang Bank Indonesia harus senantiasa mengacu pada prinsip Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi (IKKAT) yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Independensi tecermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
- b) Konsistensi tecermin dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang sejalan dengan mandat, norma, aturan, peraturan perundang-undangan, dan/atau prosedur yang berlaku, serta terukur.
- c) Koordinasi dilakukan dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka mendukung kebijakan dan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia.
- d) Akuntabilitas tecermin dalam pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Transparansi tecermin dalam keterbukaan Bank Indonesia dalam mengungkapkan informasi penting yang relevan dan memiliki implikasi luas terhadap kepentingan *stakeholder*, dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip IKKAT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia dilakukan melalui tujuh elemen Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan, yakni: (i) kejelasan mandat hukum (*clear legal mandate*), (ii) kebijakan dan strategi (*policy and strategy*), (iii) proses pengambilan keputusan (*decision making process*), (iv) tanggung jawab dan pengawasan (*responsibilities and oversight*), (v) kode etik, manajemen risiko, audit internal, dan fungsi hukum (*ethics, risk management internal audit, and legal function*), (vi) hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder relations*), serta (vii) pelaporan dan komunikasi (*reporting and communication*).



Grha Bhasvara Icchana di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, sebagai fasilitas interaksi multifungsi untuk kolaborasi, berkarya, dan berinovasi dalam harmoni

Sejalan dengan penyempurnaan sistem tata kelola tersebut, Bank Indonesia juga melakukan penajaman visi dan misi yang merupakan bagian dari salah satu elemen sistem tata kelola, yaitu kebijakan dan strategi. Penajaman visi menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam menerapkan tata kelola yang kuat dan profesional. Sementara itu, penajaman misi dilakukan untuk mengakomodir penguatan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang diamanatkan dalam UU P2SK, serta memastikan penerapan prinsip Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan. Penajaman visi dan misi dimaksud selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi Bank Indonesia, baik jangka menengah maupun tahunan.

2) *Regulatory Reform* Keamanan dan Keandalan Siber

Peningkatan tren serangan siber terjadi di tengah upaya mendorong ekonomi dan keuangan digital. Merespons tantangan peningkatan tren serangan siber tersebut, UU P2SK mengamanatkan seluruh Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dan penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) wajib menerapkan ketahanan dan keamanan siber yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Dalam menjalankan mandat ini, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan dalam pengaturan ketahanan dan keamanan siber bagi para PUSK dan Penyelenggara ITSK sektor Sistem Pembayaran, Pasar Uang, dan Pasar Valas.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah melakukan kajian akademis dan asesmen dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan ketahanan dan keamanan siber bersama dengan pihak-pihak terkait, yakni OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta ASPI. Berdasarkan asesmen pokok-pokok pengaturan tersebut, Bank Indonesia akan menyusun *framework* pengaturan ketahanan dan keamanan siber yang akan dilanjutkan dengan penyusunan PBI mengenai keamanan dan keandalan siber.

3) Pengembangan *Modern Office*

Bank Indonesia secara bertahap tengah mengimplementasikan fasilitas fisik yang modern dan berwawasan lingkungan (*modern office*) dalam mendukung sistem kerja unggul di era digital. Pada triwulan III 2023, pembangunan *Modern Office* Tahap 1 masih berlangsung, mengacu pada konsep interior dan *ambience* yang diatur dalam standar desain, bersamaan dengan pekerjaan penguatan struktur gedung di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) Kantor Pusat. Dalam implementasinya, *modern office* juga mempertimbangkan aspek *local content* dalam pemenuhan furniturnya. Sementara itu, penyesuaian rencana peruntukan, kapasitas pegawai (*stacking*), dan distribusi ruang kerja dilaksanakan secara bertahap berdasarkan konsepsi bauran kebijakan, yakni konsep penempatan ruang kerja berdasarkan

keterlibatan satuan kerja dalam bauran kebijakan, serta kedekatan proses bisnis (*workflow*) untuk mendorong proses kerja yang kolaboratif antar pegawai. *Modern office* diharapkan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ruang kolaborasi dan komunikasi yang dilengkapi dengan peralatan kerja dan teknologi guna meningkatkan produktivitas dan kreativitas pegawai.

Sebagai bagian dari *modern office*, *Millennial Function Hall* (MFH) yang mulai dibangun pada awal tahun, telah diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 17 Agustus 2023 dengan penamaan MFH menjadi Grha Bhasvara Icchana. Grha Bhasvara Icchana dimaknai sebagai sebuah tempat penuh cahaya penggugah keinginan (inspirasi) atau harapan dan tujuan, untuk keberhasilan padamasayangakandatang. Grha Bhasvara Icchana mengusung konsep *versatility*, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang multifungsi yang dapat memwadahi beragam aktivitas dalam satu ruang yang sama dengan waktu yang berbeda, serta *convertibility*, di mana desain ruangnya memungkinkan perubahan orientasi dan *ambience* sesuai dengan kebutuhan tanpa harus melakukan perombakan secara keseluruhan. Dengan demikian, penataan *layout* Grha Bhasvara Icchana dapat disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan skala kegiatan, serta tidak terbatas sebagai alternatif *co-working space*. Ke depan, Grha Bhasvara Icchana yang merepresentasikan citra Bank Indonesia yang modern dan digital juga dapat mendukung penyelenggaraan forum *high level event* Bank Indonesia dengan *stakeholder* strategis dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas.

4) Persiapan Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka Mendukung Program Pemerintah

Menindaklanjuti Perpres No. 63 Tahun 2022, Bank Indonesia terus memastikan persiapan kepindahan Bank Indonesia ke IKN secara bertahap. Persiapan yang dilakukan mencakup penguatan fungsi organisasi, kesiapan SDM, maupun pembangunan KOPERBI IKN yang telah diselaraskan dengan rencana Pemerintah dalam penyelesaian kesiapan infrastruktur IKN. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang Dioperasikan oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah menyusun konsep dokumen kerja sama sebagai tindak lanjut

atas KMK tersebut untuk pembangunan gedung Bank Indonesia di IKN.

Dari aspek pembangunan KOPERBI IKN, Bank Indonesia tengah melakukan pemenuhan pelaksana pekerjaan *design and build* serta persiapan *groundbreaking* yang rencananya akan dilakukan pada triwulan IV 2023. Secara paralel, Bank Indonesia juga melakukan upaya pemenuhan persyaratan pembangunan KOPERBI IKN, khususnya aspek legal dan lingkungan. Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan kementerian/lembaga terkait lainnya guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada saat proses kepindahan.

5) Pengembangan Pengambilan Keputusan selaras dengan *Business Process Reengineering* (BPR)

Sebagai kelanjutan atas inisiatif *business process reengineering* (BPR) berbasis digital yang dimulai sejak tahun 2022, Bank Indonesia secara berkelanjutan mengembangkan *platform Digital Workplace* untuk memperkuat proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan kepatuhan. Tahapan pengambilan keputusan mulai dari tahap inisiasi-verifikasi, rekomendasi, hingga tahap persetujuan akan dapat dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi dalam satu *platform* yang digunakan oleh pegawai dan pimpinan dengan tetap mengacu pada hak akses pengguna.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan *Digital Workplace* dalam mendukung pengambilan keputusan RDG Mingguan dan RDG Bulanan guna mewujudkan prinsip *one input, one process*, dan *multi purposes*. Pengembangan *Digital Workplace* juga didukung oleh penguatan aspek *people, process* dan *technology*. Kolaborasi dalam tahapan pengembangan, *testing*, hingga implementasi yang disertai sosialisasi, dilakukan guna meningkatkan kapabilitas pengguna. Selain itu, dokumen pedoman, infografis, dan FAQ sebagai acuan proses bisnis terkini juga senantiasa diperbarui selaras dengan pengembangan teknologi.

3.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Transformasi SDM dan Budaya Kerja terus dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja unggul berbasis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan agar mandat Bank Indonesia dapat terlaksana secara kredibel. Pada triwulan III 2023, transformasi SDM dan Budaya Kerja mencakup penyempurnaan strategi dalam mendorong kepemimpinan yang kuat dan optimalisasi budaya kerja untuk mendukung sistem kerja di era digital. Transformasi diarahkan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam memanfaatkan

teknologi digital sehingga mampu mewujudkan budaya kerja berbasis kinerja tinggi.

1) Penyempurnaan Strategi Rekrutmen dan Manajemen Karier Pegawai

Transformasi pada area pemenuhan SDM terdiri dari penyempurnaan kebijakan dan strategi rekrutmen serta penguatan manajemen karier pegawai melalui *strategic spiritual leadership*, yang bertujuan agar pegawai memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat bekerja secara optimal. Tahap penguatan kepemimpinan dimulai dari proses rekrutmen pegawai dengan prinsip terprogram, terjadwal, dan transparan untuk pemenuhan *gap* kuantitas SDM. Dari sisi *sourcing*, perluasan program studi dan kerja sama dengan *recruitment specialist* dilakukan agar diperoleh kandidat peserta dengan spesifikasi yang memadai. Bank Indonesia juga telah menggunakan metode *digital recruitment*, antara lain melalui penggunaan *end-to-end platform* mulai dari *sourcing*, *screening*, *asesmen*, *scheduling*, seleksi/*interview*, hingga *hiring*, guna mempercepat tahapan rekrutmen.

Pada triwulan III 2023, pemenuhan *gap* kualitas SDM Bank Indonesia terus dilakukan sejalan dengan mandat UU P2SK. Pemenuhan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai program pembelajaran dalam bentuk: (i) peningkatan kompetensi yang meliputi *in house training* (IHT) reguler, pembekalan (*onboarding*) bagi pegawai baru, dan persiapan pegawai yang akan melaksanakan program tugas belajar, serta (ii) program peningkatan karier bagi pegawai *officer* dan *non officer*. Pengembangan SDM juga terus dilakukan untuk kapabilitas inti kebanksentralan serta memperkuat kapabilitas digital dan kepemimpinan Bank Indonesia.

2) Optimalisasi Program Budaya Kerja untuk Mendukung Sistem Kerja di Era Digital dan *Modern Office*

Pemeliharaan SDM terus diperkuat sebagai upaya untuk memotivasi, menjaga *engagement*, dan mempertahankan talenta terbaik Bank Indonesia. Sampai dengan triwulan III 2023, berbagai inovasi strategi pemeliharaan SDM telah dilakukan Bank Indonesia dalam rangka penguatan *Employee Value Proposition* (EVP). Hal tersebut diperkuat dengan penerbitan ketentuan Sistem Kerja Unggul di Era Digital, yang diharapkan dapat memperkuat transformasi cara kerja Bank Indonesia yang didukung oleh berbagai elemen seperti fasilitas fisik dan digital, guna mencapai kinerja organisasi yang optimal melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.

Sistem kerja unggul di era digital memberikan fleksibilitas bekerja kepada pegawai secara fisik di luar jaringan dan secara virtual di dalam jaringan, dengan tetap memperhatikan tata kelola (*governance*) dan akuntabilitas. Fleksibilitas bekerja pegawai diharapkan dapat memperkuat EVP Bank Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap upaya untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik (*to attract and retain best talents*), serta mendukung implementasi *modern office*.

3) Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pengembangan *Learning Management System* (LMS) *Advanced*

Dari sisi pengembangan SDM, Bank Indonesia terus melakukan berbagai program penguatan kapabilitas pegawai, baik dari sisi kapabilitas inti kebanksentralan maupun kapabilitas *advanced* terkait digital, keberlanjutan/hijau, dan *strategic foresight*. Sepanjang triwulan III 2023, program peningkatan kompetensi yang dilakukan baik secara *offline* maupun *online* (*distance learning*) antara lain mencakup topik kebijakan bank sentral termasuk bauran kebijakan, *leadership*, *general management* pendukung kelembagaan, kapabilitas hijau, *digital technology*, dan *digital economy*. Program pengembangan kompetensi tersebut diikuti oleh 6.057 peserta dari berbagai level golongan pegawai, yang dilaksanakan dalam 160 *batch* kelas *In House Training* (IHT) dengan 98 topik IHT.

Pengembangan SDM Bank Indonesia dilakukan dengan strategi 3C untuk penguatan kapabilitas pegawai, yaitu pengembangan *immersive content*, penguatan *inclusive collaboration*, dan pengembangan *integrated channel and infrastructure*. Terkait pengembangan *integrated channel and infrastructure*, Bank Indonesia melakukan pengembangan *Learning Management System* (LMS) *Advanced* yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. LMS *Advanced* merupakan bentuk transformasi digital untuk mendukung proses pembelajaran pegawai melalui penyediaan infrastruktur digital terintegrasi yang dapat diakses seluruh pegawai dari mana saja.

Fitur LMS *Advanced* dapat digunakan untuk melakukan *learning analytics* dalam mendukung *personalized learning* pegawai, yaitu dengan memberikan berbagai alternatif modul *e-learning* yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan dilakukan secara berurutan (*sequence*) sesuai kemajuan pembelajaran pegawai pada modul yang dipilih. Penggunaan LMS *Advanced* juga dapat membantu dalam mengukur jam belajar *online* yang dilakukan pegawai secara mandiri (*self learning*)

dan dilengkapi dengan fitur evaluasi pembelajaran yang relevan untuk masing-masing modul yang dipilih.

Pada triwulan III 2023, sejumlah cakupan pengembangan LMS *Advanced* yang telah terselesaikan, antara lain: (i) katalog program interaktif, (ii) jadwal dan agenda penyelenggaraan program pembelajaran, (iii) informasi *learning history* dan kompetensi pegawai (*Learner Information Dashboard*), (iv) *Line Manager Information Dashboard*, (v) *Faculty Dashboard*, (vi) *self-enrollment/self-cancellation*/perubahan peserta, serta (vii) *audio and video streaming*.

3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan berdasarkan Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia (RIVIBI) 2022–2025. Transformasi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital dilakukan melalui tiga strategi yang meliputi: (i) pengembangan *digital business platform* untuk mendukung kebijakan dan kelembagaan, (ii) pengembangan pusat data untuk membangun data analitik yang inovatif dan unggul untuk mencapai *data-driven institution*, serta (iii) peningkatan kapabilitas dan kapasitas infrastruktur teknologi dan pengamanan secara *end-to-end*. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melakukan:

1) Pengembangan *Digital Business Platform*

a) Pengembangan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Pasar Uang

Pada triwulan III 2023, pengembangan digitalisasi yang mendukung transformasi kebijakan tetap difokuskan pada pengembangan digitalisasi di area sistem pembayaran dan pasar uang serta pelaksanaan eksplorasi inovasi digital dalam Proyek Garuda (Rupiah Digital) sesuai arah strategis BSPI dan BPPU 2025. Proses eksperimen teknologi (*proof of concept*) Proyek Garuda masih berlangsung sesuai dengan tahapan peta jalan Rupiah Digital. Pengembangan Rupiah Digital akan dikerjakan bertahap, dimulai dengan cakupan *wholesale* Rupiah Digital yang akan dilakukan hingga awal tahun 2024.

Pada area sistem pembayaran, saat ini Bank Indonesia tengah mengembangkan perluasan implementasi BI-FAST untuk layanan *direct debit*, *credit bulk*, dan *request for payment*. Bank Indonesia telah menyelesaikan tahapan uji coba bersama

industri untuk pengembangan perluasan layanan BI-FAST tersebut. Sejalan dengan pengembangan perluasan cakupan layanan BI-FAST, Bank Indonesia juga terus memperkuat kualitas layanan BI-FAST untuk merespons penggunaan BI-FAST oleh masyarakat yang meningkat signifikan. Bank Indonesia juga tengah melakukan pengembangan untuk perluasan pilihan *channel* kepesertaan dalam rangka mempermudah kepesertaan bank dalam penggunaan BI-FAST.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan *business requirement* untuk pengembangan sistem operasi moneter terintegrasi (BI-IMOS). BI-IMOS akan menjadi *single trading platform* untuk memfasilitasi seluruh transaksi operasi moneter dan penerbitan SBN Pemerintah dalam denominasi Rupiah dan valas. Tahapan pengembangan sistem akan dimulai pada awal tahun 2024.

Upaya mewujudkan ekosistem sistem pembayaran dan pasar uang yang terhubung secara 3I (*integrated, interoperable, interconnected*) terus dilakukan. Pada triwulan III 2023, standar 3I untuk cakupan BI-RTGS dan BI-FAST yang telah disusun akan dilanjutkan dengan rencana implementasi digitalisasi pada area sistem pembayaran dan pasar uang lainnya. Penggunaan standar 3I diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sistem pembayaran pada kedua sistem transfer dana tersebut.

b) Pengembangan Digitalisasi Proses Kerja

Digitalisasi pada area kelembagaan difokuskan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola organisasi khususnya dalam area pengambilan keputusan/DMP. Salah satu *platform* yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi DMP untuk mendukung pelaksanaan RDG. Pengembangan dilakukan secara bertahap dimana pada triwulan III 2023 telah diselesaikan digitalisasi DMP untuk pelaksanaan RDG Bulanan maupun topikal, serta untuk kebutuhan pengelolaan dan pemantauan *assignment* kepada satuan kerja pasca RDG. Digitalisasi DMP akan terus diperluas hingga level satuan kerja sebagai solusi untuk mendukung terciptanya pola kerja *hybrid* yang *end-to-end*.

Perumusan *business requirement* untuk digitalisasi manajemen proyek dalam rangka melakukan integrasi terhadap pengelolaan dan pemantauan seluruh proyek di Bank Indonesia juga tengah

dilakukan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyusunan *business requirement* digitalisasi manajemen strategis yang akan mengintegrasikan beberapa fungsi di area manajemen strategis, manajemen risiko, audit, dan keuangan.

2) Pengembangan Pusat Data

Sebagai bagian dari program transformasi digital, Bank Indonesia terus melanjutkan proyek pengembangan Pusat Data untuk mendukung proses pengambilan keputusan (DMP) serta perumusan kebijakan utama maupun kelembagaan. Pengembangan tersebut meliputi tiga hal. *Pertama*, pengembangan data analitik yang terdiri dari pengayaan konten data untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia (konten kebijakan) dan pengayaan konten data untuk mendukung proses bisnis di Bank Indonesia (konten kelembagaan). *Kedua*, penyiapan *platform* pusat data (infrastruktur) untuk mendukung digitalisasi data dan berbagai pengolahan data. *Ketiga*, pengembangan inovasi data yang dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbagai *use case* pengolahan data granular yang menghasilkan *insight* dengan menggunakan metodologi *Big Data Analytics*, *Machine Learning*, dan *Artificial Intelligence (AI)*.

Pada pengembangan data analitik, hingga triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menyelesaikan inisiatif konten data kebijakan seperti otomasi data pendukung pelaksanaan RDG, serta pengayaan konten untuk mendukung kebijakan moneter dan makropudensial seperti indikator uang beredar dan indikator perbankan. Sementara itu, perluasan pada area manajemen strategis termasuk indikator manajemen risiko dan pengembangan analitik di bidang PUR, operasi moneter, *Policy Technology (Poltech)*, dan *Supervisory Technology (Suptech)* yang saat ini telah berlangsung, akan terus diperkuat hingga tahun 2024 sesuai asesmen kebutuhan dan jadwal terkini. Adapun inisiatif konten data kelembagaan yang meliputi area SDM dan keuangan telah selesai diimplementasikan.

Dari sisi pengembangan *platform*, ekosistem Pusat Data telah dilengkapi dengan implementasi berbagai *platform* digitalisasi data seperti *Data Catalog*, *Data Visualization*, dan *Indra Loader Connector*. Hal ini mendukung tahapan *analytics at scale* untuk memenuhi kebutuhan

analisis secara rutin dan kebutuhan *self service* yang memungkinkan analisis data dilakukan secara mandiri.

Selanjutnya, dari sisi pengembangan inovasi data, dilakukan proses tinjauan literatur, eksplorasi data, pengembangan model, validasi, hingga penyusunan laporan. Pada triwulan III 2023, telah dilakukan inovasi pemanfaatan *machine learning* dalam *early warning* model untuk memperkuat Suptech dalam analisis kondisi bank dan pemanfaatan *big data* dalam *Network Analytics* antar entitas sistem pembayaran. Saat ini tengah dikembangkan inovasi penggunaan *big data analytics* dan *machine learning* untuk pemetaan sentimen investor global dan *behavior analysis* perbankan. Penjajakan dalam inovasi pemanfaatan AI terus dilakukan dalam rangka mendorong perbaikan kualitas informasi dan proses analisis di Bank Indonesia.

Seluruh pengembangan tersebut dilaksanakan berlandaskan prinsip *end-to-end* dan holistik. Pengembangan dimulai dengan pengaliran berbagai sumber data ke dalam suatu *data platform* untuk diolah dan dimanfaatkan dalam berbagai analisis yang memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan. Pengembangan Pusat Data diprioritaskan melalui berbagai inisiatif yang termuat dalam *roadmap RIVIBI* untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai *data-driven institution*.

3) Peningkatan Kapabilitas Infrastruktur Teknologi

Peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi merupakan bagian dari strategi transformasi digital dengan mengadopsi perkembangan teknologi terkini dan untuk memitigasi risiko siber yang semakin tinggi. Pada triwulan III 2023, telah diimplementasikan beberapa perangkat *end user* dan jaringan komunikasi data di antaranya *software define access (SDA)* yang bertujuan meningkatkan *performance* dan membantu memberikan kemudahan pada pengelolaan perangkat *access point* Bank Indonesia, serta meningkatkan kapabilitas keamanan SI di Bank Indonesia.

Peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi juga dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan stabilitas layanan digitalisasi Bank Indonesia yang telah diimplementasikan. Di area sistem pembayaran, peningkatan kapasitas infrastruktur BI-FAST pada triwulan III 2023 telah dapat mendukung transaksi BI-FAST masyarakat yang terus meningkat secara signifikan.





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 4

Capaian Kinerja
Bank Indonesia
Triwulan III 2023





Opening Karya Kreatif Indonesia 2023: Badarau Nusantara di Jakarta

Pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia pada triwulan III 2023 berjalan dengan baik di tengah perekonomian global yang melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Hal tersebut tercermin dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia yang tercapai sesuai target. Capaian dimaksud menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini. Hal tersebut juga didukung oleh upaya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola Bank Indonesia yang baik dan profesional.

Pencapaian kinerja Bank Indonesia hingga triwulan III 2023 tercermin dari capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah

- 1) **Inflasi yang rendah dan stabil melalui pengendalian inflasi inti dalam rangka pencapaian target IHK 3% ± 1% (yoy)**

Pada triwulan III 2023, inflasi inti terjaga pada level yang rendah, yaitu sebesar 2,00% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,58% (yoy). Inflasi yang terjaga tersebut merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratny sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan

Pemerintah (Pusat dan Daerah) di tengah kenaikan tekanan eksternal yang tinggi dan ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi.

Sepanjang triwulan III 2023, Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR pada level 5,75%, sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Pada RDG Oktober 2023, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program GNPIP di berbagai daerah. Sinergi yang dilakukan Bank Indonesia bersama pemangku kebijakan di daerah antara lain dalam bentuk pengendalian harga pangan melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah, subsidi fiskal, dan gerakan *urban farming* atas sejumlah bahan kebutuhan pokok.



GNPIP 2023: Inovasi Budidaya Pertanian Terintegrasi Tingkatkan Ketahanan Pangan Strategis di Banjarbaru

Dengan konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah tersebut, maka inflasi IHK pada triwulan III 2023 sebesar 2,28 (yoy), lebih rendah dibanding triwulan II 2023 yang tercatat 3,52% (yoy). Ke depan, konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah terus dipererat untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada 2024.

2) Volatilitas nilai tukar yang terjaga

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi untuk menjaga nilai tukar Rupiah dalam memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong semakin terbatasnya aliran modal ke negara berkembang dan menguatnya dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (*broad-based*), juga menekan nilai tukar Rupiah pada triwulan III 2023 yang melemah 2,99% secara *point to point* (ptp) atau 2,33% secara rerata dibandingkan dengan level triwulan II 2023. Secara *year to date*, nilai tukar tersebut menguat sebesar 0,73% (ptp) dari level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara berkembang lainnya seperti Rupee India, Peso Filipina, dan Baht Thailand yang masing-masing mengalami depresiasi sebesar 0,37%, 1,50%, dan 4,98%.

Pada triwulan III 2023, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui: (i) intervensi di pasar valas

dengan transaksi *spot* dan DNDF, (ii) penerbitan SRBI sebagai instrumen operasi moneter (kontraksi) yang *pro-market* dalam rangka memperkuat pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, (iii) optimalisasi instrumen operasi moneter valas DHE berupa TD valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia, serta (iv) penambahan frekuensi dan tenor lelang TD Valas jangka pendek dengan suku bunga kompetitif.

3) Pengelolaan cadangan devisa yang optimal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dengan target sesuai standar kecukupan nilai impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah jangka pendek

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 tetap tinggi, tercatat sebesar 134,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor, atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia meyakini cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan strategi operasi moneter valas untuk menjaga kecukupan cadangan devisa.

Selanjutnya, kinerja NPI terus mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal. Surplus neraca



Explore Babel (Bangka Belitung) 2023 di Pangkalpinang

perdagangan masih berlanjut pada triwulan III 2023 sebesar 7,8 miliar dolar AS dan menopang prospek transaksi berjalan tetap sehat. Sementara itu, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mendorong aliran keluar modal asing (*net outflows*) dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan III 2023.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PS 02 Memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

- 4) Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyelesaian tindak lanjut arahan rapat koordinasi pengendalian inflasi serta rekomendasi dan/atau tindak lanjut kesepakatan sebelumnya dengan kementerian/ lembaga untuk mendukung kinerja industri manufaktur dan pariwisata

Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis lainnya terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui

TIPI dan TPID, serta penguatan program GNPIP untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Pada 31 Agustus 2023, Bank Indonesia bersama TIPI serta didukung TPID menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”. Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan kepada TIPI dan TPID untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh GNPIP. Sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh melalui lima langkah kebijakan. *Pertama*, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya. *Kedua*, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. *Ketiga*, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah. *Keempat*, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. *Kelima*, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mendukung upaya Pemerintah dalam

pengendalian inflasi pangan melalui TPIP dan TPID dengan memperkuat pelaksanaan GNPIP di berbagai daerah, guna mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Berbagai program GNPIP untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan ditempuh berdasarkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Terdapat tujuh program unggulan yang telah ditempuh GNPIP, yakni: (i) dukungan optimalisasi Operasi Pasar/pasar murah, (ii) penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, (iii) peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana prasarana produksi pertanian (saprotran), (iv) penguatan kerja sama antardaerah (KAD), (v) fasilitas distribusi pangan, (vi) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, data dan informasi pangan, serta (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Implementasi program GNPIP terus diperkuat antara lain untuk memitigasi beberapa risiko, seperti dampak ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan global, gangguan cuaca karena fenomena perubahan iklim, serta kesenjangan pasokan seiring dengan masih mengemukanya kendala produktivitas dan konektivitas. Peran 46 KPwDN Bank Indonesia di seluruh Indonesia terus dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas GNPIP dalam mengendalikan inflasi pangan di berbagai daerah. Ke depan, komitmen untuk mengakselerasi upaya bersama ini akan terus diperkuat untuk memastikan terkendalinya inflasi sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Bank Indonesia bersama Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi intensif dalam mendorong program hilirisasi melalui implementasi kebijakan penguatan struktur industri manufaktur, termasuk menindaklanjuti 10 dari 11 pokok kesepakatan Rapat Koordinasi *High Level Manufaktur 2022*. Bank Indonesia juga terlibat secara aktif dalam penajaman kebijakan terkait industri hilir prioritas nasional melalui pelaksanaan berbagai diskusi kebijakan secara bilateral maupun multilateral, serta penyusunan kajian/riset, dan survei bersama. Implementasi strategi tersebut sejalan dengan agenda Pemerintah dalam mendukung program hilirisasi mineral guna terciptanya produk hilir bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan memiliki faktor pengganda tinggi. Hal ini akan mendukung akselerasi penguatan struktur industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung kinerja pariwisata, Bank Indonesia bersama seluruh kementerian/lembaga

yang terlibat dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pariwisata telah menindaklanjuti seluruh kesepakatan hasil Rapat Koordinasi *High Level* Pariwisata tahun 2022. Sepuluh butir kesepakatan tersebut terutama ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), pengembangan pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*), khususnya di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan memperkuat strategi 3A2P (Akses, Atraksi, Amenitas, Promosi, dan Pelaku Pariwisata).

Sinergi Bank Indonesia bersama kementerian/lembaga terkait dalam kerangka Sekber Pariwisata terus dilakukan untuk mendorong akselerasi kinerja pariwisata. Berbagai rangkaian koordinasi Bank Indonesia bersama Sekber Pariwisata difokuskan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), termasuk melalui optimalisasi penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* dan *event*. Sejalan dengan itu, upaya mendorong pengembangan pariwisata berkualitas juga terus dilakukan melalui asesmen dan *monitoring* periodik di DPSP yang dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga terkait. Hasil asesmen menyeluruh terhadap penerapan aspek-aspek pariwisata berkualitas dan prioritas kebijakan yang perlu ditempuh dalam pengembangan DPSP disampaikan secara khusus dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara periodik. Selain itu, hasil asesmen tersebut juga dituangkan dalam buku "*Insight Report Penerapan Quality Tourism dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional*" yang disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait dan juga dapat diakses melalui situs Bank Indonesia oleh masyarakat luas.

5) **Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam koordinasi kebijakan moneter dan fiskal melalui penyampaian pertimbangan Bank Indonesia kepada Pemerintah mengenai APBN dan penerbitan/pengelolaan SBN (Global dan Domestik)**

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal melalui penyampaian beberapa pertimbangan dalam:

- a) Rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dan Bank Indonesia terkait Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk materi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

- b) Rapat koordinasi terkait kesinambungan moneter dan fiskal, antara lain pada rapat dengan Kementerian Keuangan terkait rencana penerbitan *global bonds* selama tahun 2023.
- c) Koordinasi bersama Kementerian Keuangan dalam rapat koordinasi terkait Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk materi dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024.
- d) Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah (melalui Kementerian Keuangan) dalam proses perencanaan, penerbitan dan pengelolaan Surat Berharga Negara, baik global maupun domestik.

PS 03 Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial untuk mendorong intermediasi, mendukung ketahanan sistem keuangan, memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta perlindungan konsumen dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan

- 6) Kebijakan makroprudensial yang mendukung sisi penawaran perbankan dalam kredit/pembiayaan ekonomi yang tecermin dari pertumbuhan kredit perbankan

Kredit perbankan pada akhir triwulan III 2023 tercatat tumbuh 8,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 7,76% (yoy), angka ini diperkirakan masih akan terus tumbuh hingga akhir 2023. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kredit sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Pengangkutan yang tumbuh mencapai 9,76% (yoy). Pertumbuhan kredit segmen UMKM juga terus berlanjut yaitu mencapai 8,90% (yoy) pada triwulan III 2023. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dari sisi penawaran dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan melalui kebijakan makroprudensial akomodatif. Selama triwulan laporan, Bank Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan makroprudensial akomodatif antara lain: (i) mempertahankan rasio CCyB dan RIM, (ii) menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5% dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS),

dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5% yang ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, yang akan berlaku mulai 1 Desember 2023, (iii) melanjutkan pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti dan (iv) melanjutkan kebijakan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Bank Indonesia juga memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang ditujukan kepada BUK dan BUS/UUS dan akan berlaku sejak 1 Oktober 2023. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan besaran insentif maksimum 4% difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya kepada sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi (Minerba, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan), Perumahan (termasuk perumahan rakyat), Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UMKM, KUR, Mikro, dan hijau yang berlaku sejak 1 Oktober 2023.

- 7) Surveilans makroprudensial untuk mendukung ketahanan sistem keuangan yang tecermin dari agregat rasio Alat Likuid (AL) per Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 30 bank besar

Pada triwulan III 2023, ketahanan sistem keuangan tetap terjaga di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ketahanan sistem keuangan yang ditunjukkan dengan likuiditas perbankan tetap terjaga. Hal ini tecermin dari indikator AL terhadap DPK dari 30 bank besar yang tercatat tinggi yakni mencapai 25,83% serta didukung oleh pertumbuhan DPK sebesar 6,54% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan dan meningkatnya kredit/pembiayaan guna berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan surveilans makroprudensial, Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap sistem keuangan menggunakan pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS). Pemantauan DSRS dan analisis identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan beberapa *tools*, antara lain *interconnectedness*, *stress test*, dan *contagion analysis* yang juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan surveilans dan pengawasan (Suptech). Seiring dengan implementasi UU P2SK, pelaksanaan *surveilans* dan pengawasan juga mengikuti perkembangan kebijakan makroprudensial



Penandatanganan MoU pendirian *Indonesia House of Beans* di Washington, D.C.

termasuk dalam hal mendukung intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan.

8) Efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong inklusi ekonomi dan keuangan yang diukur melalui: (i) Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan (ii) jumlah akumulasi peningkatan UMKM yang berdaya saing

Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan inklusif melalui penguatan insentif makroprudensial dan pengembangan UMKM. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) penyaluran kredit/pembiayaan inklusi oleh perbankan melalui lembaga jasa keuangan lainnya dan turut memperhitungkan kepemilikan obligasi inklusi dan/atau berwawasan lingkungan oleh perbankan, serta (ii) penguatan kebijakan insentif makroprudensial berupa peningkatan pemberian insentif bagi bank dengan pencapaian target RPIM yang lebih tinggi sejak April 2023. Pada akhir tahun 2022, RPIM tercatat sebesar 32,73%, terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit UMKM. Selanjutnya, penghitungan realisasi RPIM tahun 2023 akan dilakukan kembali pada awal tahun 2024.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia terus mendorong pengembangan UMKM yang berdaya saing. Sejumlah program yang diselenggarakan Bank Indonesia, antara lain: (i) implementasi *best practice* dalam rangka peningkatan produktivitas klaster pangan, (ii) program *onboarding* UMKM pada *marketplace*, (iii) perluasan akses pasar global melalui kurasi nasional UMKM untuk

produk kopi, turunan kain, kriya, dan aksesoris oleh kurator profesional, serta (iv) perluasan pasar ekspor melalui rangkaian kegiatan *showcase* di dalam dan luar negeri untuk promosi perdagangan internasional. Bank Indonesia akan terus memfasilitasi pengembangan UMKM sehingga jumlah UMKM yang berdaya saing akan terus meningkat.

PS 04 Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan otoritas terkait untuk mendorong intermediasi, mendukung ketahanan sistem keuangan, memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta perlindungan konsumen dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan

9) Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan lintas otoritas dalam mendukung pembiayaan ekonomi melalui kesepakatan/penyelesaian agenda koordinasi

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas di sektor keuangan dalam rangka mendukung pembiayaan ekonomi. Bank Indonesia terlibat dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait harmonisasi ketentuan transaksi di pasar modal, penerapan sanksi dan izin usaha, perbankan, pengaturan dan pengawasan terkait implementasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) DHE Sumber Daya Alam (SDA), serta implementasi *primary dealer* untuk penguatan kepesertaan OM. Bank Indonesia juga melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK

dalam rangka penyusunan RPP tentang Komite Keuangan Berkelanjutan (RPP KKB). *Kickoff meeting* perumusan RPP KKB yang telah dilakukan pada Maret 2023 dilanjutkan dengan rangkaian pertemuan level teknis hingga triwulan III 2023.

Bank Indonesia juga ikut serta dalam berbagai fora internasional, antara lain melalui kontribusi aktif dalam pelaksanaan *The 4th Sustainable Sustainable Finance Working Group (SFWG) Meeting* terkait capaian Indonesia pada *G20 Sustainable Finance Roadmap*, serta penyusunan *ASEAN Green Map* pada *Asean Senior Level Committee (SLC) Task Force on Sustainable Finance (TFSF)*. Berbagai upaya sinergi Bank Indonesia ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong keuangan berkelanjutan.

10) Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan lintas otoritas dalam mendukung ketahanan sistem keuangan melalui kesepakatan/penyelesaian agenda koordinasi

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas di sektor keuangan melalui wadah KSSK. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia bersama anggota KSSK lainnya menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK III 2023. KSSK memandang bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi terjaga seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat, di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang semakin tinggi yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, serta risiko kenaikan suku bunga global untuk mengendalikan tekanan inflasi. Pada rapat tersebut, KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global, termasuk dampak rambatan keuangan global yang dapat mengganggu SSK nasional.

Pada triwulan III 2023, KSSK terus melakukan koordinasi intensif, antara lain terkait (i) pembahasan *cross cutting issues* dan penyusunan peraturan pelaksanaan terkait tindak lanjut UU P2SK yang memerlukan koordinasi antar lembaga di KSSK, (ii) koordinasi terkait perluasan cakupan sosialisasi UU P2SK kepada *stakeholder*, serta (iii) koordinasi terkait pelaksanaan simulasi krisis guna meningkatkan pencegahan dan penanganan krisis. Koordinasi dalam wadah KSSK juga dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*.

Pada September 2023, Bank Indonesia telah menerbitkan buku *Kajian Stabilitas Keuangan (KSK)*

No. 41 bertema Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Mendorong Intermediasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Buku tersebut menegaskan optimisme Bank Indonesia pada stabilitas sistem keuangan yang didukung implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif serta penguatan sinergi dengan KSSK, otoritas terkait, pelaku usaha, dan seluruh pihak baik di lingkup nasional maupun global.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan OJK dan LPS dalam mendukung ketahanan sistem keuangan. Koordinasi dengan OJK di antaranya dilakukan melalui harmonisasi kebijakan/ketentuan kedua lembaga. Ketentuan yang diharmonisasikan sampai dengan triwulan III 2023 antara lain PBI PLJP dan PLJPS yang telah diterbitkan pada Juni 2023, Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS, dan RSEOJK Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Sementara itu, koordinasi dengan LPS antara lain dilakukan melalui koordinasi kebijakan/ketentuan, serta pertukaran data dan informasi. Bank Indonesia juga melakukan *revisit* payung koordinasi bilateral dengan OJK dan LPS. *Revisit* tersebut merupakan bentuk respons Bank Indonesia atas penyesuaian mandat institusi dan penyalarsan pengaturan terkini sebagai tindak lanjut UU P2SK.

11) Sinergi untuk penguatan ekonomi dan keuangan inklusif serta perlindungan konsumen melalui: (i) kesepakatan/penyelesaian agenda koordinasi lintas otoritas terkait ekonomi dan keuangan inklusif serta perlindungan konsumen, (ii) edukasi inklusi ekonomi dan keuangan serta peningkatan literasi konsumen, serta (iii) peningkatan omzet dan *business matching* dalam kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) serta kegiatan sinergi lainnya

Sejalan dengan amanat UU P2SK, Bank Indonesia melakukan sinergi dengan berbagai otoritas terkait lainnya dalam rangka penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinergi terkait ekonomi dan keuangan inklusif, perlindungan konsumen, dan peningkatan literasi konsumen. Dalam rangka mendukung inklusi ekonomi dan keuangan serta perlindungan konsumen, Bank Indonesia melanjutkan kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK).



Pagelaran Karya Kreatif Muda 2023 dengan tema Cita Muda Wastra Indonesia di Jakarta

Dalam rangka edukasi inklusi ekonomi dan keuangan serta peningkatan literasi konsumen, termasuk aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain: (i) penyelenggaraan sejumlah *talkshow* dan edukasi terkait perlindungan konsumen di sejumlah daerah, dan (ii) pelaksanaan *training of trainers* (ToT), sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan SIAPIK kepada UMKM.

Penguatan ekonomi juga dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas UMKM serta akses pemasaran dan pembiayaan UMKM. Bank Indonesia secara proaktif mendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah terkait GBBi dan BBWi melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sampai pertengahan tahun 2023, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan GBBi di Provinsi Banten, Kalimantan Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Partisipasi aktif Bank Indonesia dalam rangkaian GBBi tersebut akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2023. Pada 27-30 Juli 2023, Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) untuk memacu motivasi pelaku UMKM agar semakin meningkatkan kreativitas, inovasi, dan semangat untuk terus tumbuh menjadi UMKM Indonesia Naik Kelas, *Go Global, Go Export* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pagelaran KKI tersebut berhasil mencatatkan omzet sebesar

Rp449,5 miliar atau meningkat 42% dari tahun sebelumnya.

PS 05 Memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah (SP-PUR) untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

12) Industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif yang tecermin dari tingkat kepatuhan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) terhadap ketentuan sistem pembayaran

Bank Indonesia terus melanjutkan upaya menjaga industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif melalui pemantauan kepatuhan PJP dan PIP terhadap ketentuan, antara lain terkait permodalan, manajemen risiko dan sistem informasi, *fraud detection system*, dan kelengkapan pengendalian internal. Hingga triwulan III 2023, Bank Indonesia telah memproses 754 permohonan perizinan dan persetujuan pengembangan aktivitas, produk dan/atau kerja sama oleh PJP dan PIP. Keseluruhan permohonan tersebut diproses secara efektif sesuai *Service Level Agreement* yang diatur dalam ketentuan. Surveilans yang dilakukan Bank Indonesia terus memastikan bahwa tingkat pemenuhan ketentuan permodalan dan kecukupan manajemen risiko sesuai dengan targetnya

pada periode hingga akhir 2023. Selain itu, Bank Indonesia juga terus meningkatkan layanan perizinan dan persetujuan dalam rangka menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengendalian risiko.

13) Infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta aman dan andal, yang tecermin dari: (i) jumlah pengguna dan volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), (ii) implementasi BI-FAST dan surrounding system, serta (iii) ketersediaan layanan sistem pembayaran Bank Indonesia yang andal sesuai standar internasional

Perkembangan transaksi, pengguna, dan merchant QRIS terus berakselerasi dan melampaui target. Sampai dengan September 2023, volume transaksi QRIS telah mencapai 1,35 miliar transaksi dengan jumlah pengguna mencapai 41,84 juta pengguna, dan 29,04 juta merchant, dimana 92% di antaranya adalah UMKM. Bank Indonesia terus melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) sosialisasi, edukasi dan kampanye bersama industri dan pihak terkait mengenai manfaat, inovasi fitur, keamanan bertransaksi, termasuk kebijakan skema harga QRIS yang efisien, (ii) peningkatan intensitas kampanye bersama industri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk MDR QRIS Usaha Mikro (UMi) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (QRIS TUNTAS), serta (iii) perluasan kerja sama dan pengembangan QRIS Antarnegara, antara lain dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.

Bank Indonesia juga terus mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur yang mendukung ketersediaan layanan pembayaran ritel secara *real time, seamless*, tersedia 24 jam dan 7 hari (24/7) dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi secara *end-to-end*. BI-FAST telah menjadi preferensi utama masyarakat untuk melakukan transfer dana dengan pangsa transaksi yang melampaui infrastruktur sistem pembayaran lainnya, khususnya untuk *capping* transaksi Rp250 juta. Hingga triwulan III 2023, total volume transaksi BI-FAST tercatat sebanyak 1,45 miliar transaksi dengan total nominal transaksi sebesar Rp4.013,39 triliun. Dengan demikian, sejak pertama diluncurkan, BI-FAST telah mencatat total volume transaksi sebanyak 2,07 miliar transaksi dan total nominal sebesar Rp5.990,94 triliun.

14) Praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar, selaras dengan arah kebijakan sistem pembayaran dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional melalui ketersediaan kebijakan untuk mendukung praktik pasar yang sehat, termasuk efisiensi harga

Bank Indonesia terus melanjutkan upaya mewujudkan industri sistem pembayaran nasional yang sehat, efisien, dan wajar. Untuk mendukung akselerasi ekosistem ekonomi keuangan digital di Indonesia, Bank Indonesia terus melakukan *review* kebijakan skema harga di bidang sistem pembayaran. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan *merchant discount rate* (MDR) QRIS segmen UMi berdasarkan nominal per transaksi secara progresif dengan memperhatikan kesiapan sistem industri. Kebijakan ini dilanjutkan dengan monitoring atas implementasi kebijakan QRIS, baik QRIS TUNTAS maupun MDR QRIS untuk UMi.

15) Pengembangan Digital Rupiah Wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC) interbank fund transfer untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, sistem keuangan, dan integrasi EKD nasional melalui penerbitan Consultative Paper Digital Rupiah

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Rupiah Digital. Bank Indonesia telah menerbitkan *Consultative Paper* Tahap I berjudul “Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger” pada 31 Januari 2023. *Consultative Paper* tersebut dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari *stakeholder (public - private collaboration)* terkait desain, dampak, dan manfaat Rupiah Digital yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Bank Indonesia telah menyelenggarakan FGD bersama *stakeholder* dengan pendalaman masing-masing topik pada *Consultative Paper*. Hingga triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menerima 41 masukan dari bank, lembaga selain bank (LSB), kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, korporasi non keuangan, serta lembaga internasional dan individu.

16) Ketersediaan uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dalam kualitas yang layak edar, yang tecermin dari: (i) tingkat kelayakan uang Rupiah di wilayah NKRI (soil level) Uang Pecahan Besar/UPB dan Uang Pecahan Kecil/UPK serta (ii) jangkauan distribusi uang Rupiah di wilayah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) melalui kegiatan kas keliling dan kas titipan

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah di wilayah NKRI terus dilanjutkan. Kinerja Bank Indonesia dalam menjaga dan menyediakan uang Rupiah dalam kualitas yang layak edar di seluruh NKRI antara lain ditunjukkan dari tingkat kelayakan uang yang tecermin dari target *range soil level*. Hasil survei standar kelayakan uang Rupiah kertas (*soil level*) di seluruh wilayah NKRI menunjukkan



Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2023 di Jakarta

bahwa tingkat kelayakan uang masih terjaga dengan baik, tecermin dari *soil level* UPB yang berada pada level 9,9 dan UPK pada level 8,2.

Bank Indonesia terus menjaga kecukupan penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah 3T. Perluasan jangkauan pengedaran uang Rupiah di wilayah 3T terus dilakukan melalui kegiatan kas keliling dan kas titipan. Sampai dengan triwulan III 2023, telah dilaksanakan pengedaran uang ke 212 wilayah 3T.

PS 06 Memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital

17) Sinergi dalam rangka elektronifikasi transaksi, yang tecermin dari: (i) peningkatan Pemda yang berada di tahap kategori digital, (ii) keberhasilan perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial, dan (iii) kesepakatan model bisnis *Multi Lane Free Flow* (MLFF) terkait sistem pembayaran

Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengembangkan EKD terus berlanjut. Sinergi melalui program strategis Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menghasilkan tingkat digitalisasi Pemda yang semakin meningkat. Hingga triwulan III 2023, Pemda dengan kategori digital telah mencapai 399 Pemda atau 73,6% dari 542 Pemda. Jumlah tersebut lebih tinggi 9% dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Bank Indonesia juga terus mendukung digitalisasi Pemda dengan melakukan pendampingan peningkatan kualitas data Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui *Training on Trainer* (ToT) sekaligus koordinasi, fasilitasi, serta *capacity building* kepada KPwDN dan Pemda.

Terkait Elektronifikasi bantuan sosial (bansos), Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk menjajaki kemungkinan uji coba digitalisasi bansos Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) tahun 2023. Bank Indonesia juga bersinergi dengan kementerian/ lembaga dalam rangka penguatan landasan hukum tentang Reformasi Sistem Pelindungan Sosial dan mematangkan konsep *central mapper* atau Pusat Pemeta Data Terintegrasi (PPDT) sebagai *shared infrastructure* untuk perbaikan tata kelola data bansos.

Sementara itu, dukungan Bank Indonesia untuk elektronifikasi sektor transportasi dan jalan tol terus dilakukan, khususnya dalam inisiatif MLFF, dengan memastikan model bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip sistem pembayaran. Bank Indonesia bersama otoritas terkait dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) terpilih akan mengevaluasi model bisnis MLFF secara berkelanjutan. Bank Indonesia telah menyampaikan usulan model bisnis MLFF kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Usaha Jalan Tol untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pengembangan MLFF.

18) Sinergi dan penguatan komunikasi dalam rangka pengembangan EKD, pengawasan industri sistem pembayaran, dan peningkatan literasi digital melalui perluasan implementasi Standar *Open API* Pembayaran (SNAP) kepada pengguna layanan

Bank Indonesia terus memperkuat penerapan SNAP dengan memperluas keterlibatan industri dalam ekosistem EKD dalam rangka pengembangan EKD. Hingga triwulan III 2023, Bank Indonesia telah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pengajuan verifikasi SNAP dari 46 PJP Penyedia Layanan yang

bekerja sama dengan 561 pengguna layanan untuk 2.302 sub-layanan API. Bank Indonesia akan terus mendorong dan memastikan perluasan implementasi SNAP sesuai *action plan*, untuk memperkuat *interlink* antara PJP bank dengan nonbank dan menjaga *level of playing field* antar pelaku, sehingga mengurangi fragmentasi dan mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Bank Indonesia bersama ASPI juga terus memperkuat aspek pemenuhan jumlah dan kapasitas SDM (aspek *people*), penyusunan pedoman pengelolaan (aspek *process*), serta penyediaan infrastruktur dan *software* (aspek *technology*).

Terhitung mulai 1 September 2023, Bank Indonesia mengalihkan pengelolaan SNAP kepada ASPI sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO). Sebelumnya, sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2021, pengelolaan SNAP dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengalihan pengelolaan SNAP kepada ASPI bertujuan untuk mendorong inovasi industri, khususnya dalam pengembangan *Open API* sistem pembayaran. Dengan dialihkannya pengelolaan SNAP ke ASPI diharapkan akan terdapat perluasan layanan dan pengguna SNAP ke depan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inovasi sektor pembayaran di Indonesia.

19) Sinergi dalam rangka pemanfaatan data EKD untuk publik melalui penyusunan *Consultative Paper Unique Digital Identifier* untuk mendukung EKD

Bank Indonesia terus melakukan sinergi dengan industri dan berbagai otoritas dalam pendalaman *conceptual design Unique Digital Identifier*. Sinergi tersebut bertujuan untuk mendalami berbagai alternatif *Unique Digital Identifier* yang dapat digunakan untuk mendorong kemudahan transaksi sistem pembayaran serta mendukung pemanfaatan data terkait EKD dalam formulasi kebijakan Bank Indonesia. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dan FGD dengan industri dan otoritas terkait untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan *Payment ID* sebagai *Unique Digital Identifier*.

PS 07 Mengakselerasi pengembangan pasar uang untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dan sinergi pembiayaan ekonomi

20) Infrastruktur pasar uang yang terintegrasi, interkoneksi dan interoperabilitas, serta aman dan andal melalui implementasi Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) *Multi Matching* DNDF dan pengembangan *Central Counterparty* (CCP)

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan infrastruktur pasar uang yang memenuhi aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi, serta aman dan andal. Bank Indonesia melanjutkan inisiatif utama dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan melalui implementasi *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dan *Electronic Trading Platform* (ETP) *Multimatching* DNDF yang dilaksanakan secara bertahap. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait untuk mengakselerasi implementasi kedua inisiatif tersebut sesuai tahapan pengembangan, termasuk memastikan kesiapan penyelenggara dalam pengembangan sistem sebelum dapat diimplementasikan secara penuh. Sejumlah koordinasi intensif dan FGD dilakukan dengan *stakeholder* terkait agar pentahapan implementasi CCP SBNT dan ETP *Multimatching* DNDF dapat berjalan optimal. Koordinasi juga mencakup penyusunan pokok pengaturan infrastruktur pasar keuangan sejalan dengan mandat UU P2SK dan PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valas.

21) Pasar uang Rupiah dan valas yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, yang tecermin dari: (i) Rasio transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) terhadap transaksi derivatif dan (ii) Rasio transaksi *repo* terhadap total transaksi pasar uang

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan pasar uang Rupiah dan pasar valas yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Keberhasilan instrumen utama Bank Indonesia dalam pengembangan pasar uang dan pasar valas tecermin melalui peningkatan transaksi *repo* di pasar uang dan penggunaan DNDF dalam transaksi derivatif.

Hingga triwulan III 2023, transaksi pasar uang khususnya *repo* dan *call money* menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini didukung oleh upaya bersama antara Bank Indonesia, otoritas terkait, dan pelaku pasar uang dalam memperluas adopsi *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA), termasuk mendukung kesiapan implementasi *primary dealer*. Dalam rangka mendorong kinerja transaksi DNDF sebagai instrumen lindung nilai, Bank Indonesia terus melanjutkan sinergi dengan *stakeholder* terkait, khususnya dengan pelaku pasar, antara lain melalui inisiatif integrasi DNDF dengan kerangka LCT untuk mendorong pemanfaatan DNDF non-USD.



Talkshow Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It!) 2023: *Understanding Financial Investing for Entrepreneurs* di Jakarta

Selanjutnya, sebagai respons terhadap amanat UU P2SK dalam pengembangan pasar keuangan, Bank Indonesia melakukan penguatan regulasi terkait pasar uang dan pasar valuta asing (*regulatory reform*) dengan menerbitkan PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA).

22) Sinergi Bank Indonesia dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) untuk mendukung pembiayaan perekonomian melalui penyelesaian tindak lanjut kesepakatan sesuai kewenangan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam FK-PPPK guna mendorong pembiayaan perekonomian dari pasar keuangan. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia bersama anggota FK-PPPK mendetailkan program prioritas pengembangan *Green and Sustainable Instrument*, termasuk kolaborasi dalam mengkaji potensi *transition finance framework/guideline*. Selain itu, pada September 2023, Bank Indonesia bersama anggota FK-PPPK lainnya juga melakukan kegiatan edukasi dalam kerangka Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) dengan tema “Mendorong Literasi dan Investasi Keuangan Generasi Muda Pelaku Usaha”. Rangkaian LIKE IT berlangsung dalam tiga seri dan diselenggarakan secara bergantian oleh anggota FK-PPPK. Pada LIKE IT #1, Bank Indonesia mengambil tema “*Rising Stars: Young Entrepreneurs Shine in Financial Investing*” yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

PS 08 Mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan Kebijakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

23) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah, yang tercermin dari: (i) pertumbuhan rata-rata harian (RRH) pasar uang syariah dan (ii) pertumbuhan pembiayaan syariah

Bank Indonesia memiliki tiga fokus kebijakan guna meningkatkan pangsa keuangan syariah. *Pertama*, inovasi khususnya yang menyangkut inovasi kebijakan, maupun instrumen pendanaan, dan pembiayaan syariah. Dari sisi kebijakan yang menyentuh *real sector based financing*, Bank Indonesia mendorong inovasi kebijakan RPIM dan KLM, baik untuk perbankan konvensional maupun syariah. *Kedua*, digitalisasi dimana Bank Indonesia bersinergi dengan Badan Wakaf Indonesia menginisiasi *platform* digital pengelolaan wakaf yang terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas untuk masyarakat, mampu meningkatkan jumlah pengumpulan wakaf, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan. *Ketiga*, sinergi pengembangan ekonomi syariah bersama otoritas, KNEKS, dan lintas *stakeholder* di antaranya melalui program Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan operasi moneter yang terintegrasi dan mendorong pengembangan pasar



Pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyiar) Regional Sumatra 2023 di Medan

uang syariah, Bank Indonesia senantiasa memastikan agar likuiditas di pasar uang syariah tetap terjaga sehingga membantu perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditasnya. Transaksi pasar uang syariah yang optimal tecermin dari peningkatan transaksi antar pelaku pasar uang, khususnya pada instrumen/transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA), dan repo syariah.

Pada aspek penguatan pelaku pasar uang syariah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang diharapkan dapat memperkuat peran pelaku pasar dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. Pada aspek pembiayaan, sampai dengan triwulan III 2023 pembiayaan syariah tercatat masih tumbuh sebesar 15,31% (yoy). Sebagai upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah dimaksud, Bank Indonesia bersama OJK, KNEKS, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyelenggarakan Bulan Pembiayaan Syariah sebagai forum sinergi dan kolaborasi untuk memperkuat pembiayaan syariah pada sisi penawaran dan permintaan, khususnya pada sektor ekonomi yang dapat mendorong perekonomian nasional. Pada kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah, Bank Indonesia bersama KNEKS memfasilitasi kegiatan *business matching* pembiayaan syariah bagi UMKM.

24) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung usaha syariah, yang tecermin dari: (i) jumlah pelaku usaha yang semakin utuh (*kaffah*) menerapkan prinsip syariah dan (ii) nilai omzet dan *business linkage* dalam rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) termasuk Festival Ekonomi Syariah (FESyiar)

Bank Indonesia terus melanjutkan sinergi bersama KNEKS dan *stakeholder* terkait untuk mendukung dan mendorong program pemberdayaan pelaku usaha syariah. Pemberdayaan usaha syariah dilaksanakan untuk memperkuat ekosistem produk halal melalui pengembangan komoditas pangan sebagai salah satu program GNPIP, penguatan jaminan produk halal, serta penguatan ekosistem nasional dan ekspor halal.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan model bisnis untuk mendukung terciptanya ekosistem halal, khususnya di pesantren. Pengembangan model bisnis dilakukan antara lain melalui pengembangan *Center of Excellence* Hidroponik, pengembangan model ekosistem sapi potong, dan pengembangan TOBAKU Halal. Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah memulai penyusunan *Guiding Principles* ekosistem jaminan produk halal dan replikasi INFRATANI (*Integrated Farming with Technology and Information*).

Bank Indonesia juga mulai menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangkaian menuju ISEF 2023 (*Road to ISEF 2023*) sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Rangkaian kegiatan menuju ISEF 2023 yang diselenggarakan pada triwulan III 2023 antara lain

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) regional Sumatra di Sumatra Utara pada 20–23 Juli 2023 dan FESyar regional Jawa di Jawa Timur pada 29 September–1 Oktober 2023. Pada kegiatan FESyar, Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia) telah melakukan seleksi produk *food* dan *fashion* binaan atau mitra Bank Indonesia di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam rangka membuka akses pasar bagi produk unggulan tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan *Indonesia International Modest Fashion Festival* (IN2MF) Paris dan berpartisipasi dalam kegiatan Muslim LifeFest.

25) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah melalui riset, asesmen, dan edukasi yang tecermin dari indeks literasi ekonomi syariah (*well literate*)

Bank Indonesia terus melakukan berbagai kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait kegiatan edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia melakukan kegiatan edukasi dan literasi ekonomi syariah pada FESyar regional Sumatra yang diselenggarakan pada 20-23 Juli 2023 di Sumatra Utara dan FESyar Jawa yang diselenggarakan pada 29 September-1 Oktober 2023 di Jawa Timur. Penyelenggaraan kegiatan FESyar tersebut diharapkan semakin memperkuat penerapan *halal lifestyle* di Indonesia, baik dari sisi pengguna maupun penyedia barang dan jasa, sehingga mendukung visi Indonesia menjadi produsen *halal* terkemuka di dunia. Bank Indonesia juga telah menyusun berbagai materi edukasi baik dalam bentuk video maupun media komunikasi lain yang disebarluaskan di berbagai *platform* dalam jaringan/ daring (*online*), termasuk melalui media sosial yang dinilai efektif dan optimal guna mendukung peningkatan literasi ekonomi syariah termasuk penerapan *halal lifestyle*.

PS 09 Memperkuat efektivitas kerja sama internasional untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, SP-PUR, dan bidang lainnya dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/ atau ekonomi Indonesia.

26) Persepsi positif lembaga internasional dan investor global terhadap perekonomian Indonesia yang terjaga, yang tecermin dari laporan lembaga internasional, lembaga *rating*, dan investor/pelaku sektor riil yang positif

Bank Indonesia terus melanjutkan upaya menjaga persepsi positif lembaga internasional dan lembaga pemeringkat investasi terhadap perekonomian Indonesia. Persepsi positif tersebut antara lain tecermin dari publikasi hasil asesmen dari lembaga pemeringkat Fitch pada 1 September 2023 yang kembali mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas level terendah *investment grade*) dengan *outlook* stabil. Hasil asesmen ini menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga. Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Bank Indonesia juga terus berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif internasional terhadap perekonomian Indonesia kepada investor global. Hingga triwulan III 2023, Bank Indonesia berhasil merespons berbagai *concern* investor dan menjaga persepsi positif investor di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi global dan berbagai risiko ekonomi domestik. Keberhasilan tersebut dilaksanakan melalui komunikasi dan *engagement* yang intensif dengan lembaga pemeringkat dan investor asing, di antaranya melalui *Investor Conference Call* (ICC) setiap bulan pasca RDG Bulanan bersama dengan Kementerian Keuangan. Kegiatan *outreach* otoritas kepada investor melalui ICC diapresiasi oleh kalangan investor serta lembaga pemeringkat sebagai bentuk transparansi dalam upaya untuk memberikan pemahaman terhadap langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Selain itu, sepanjang triwulan III 2023 Bank Indonesia juga melakukan *engagement* dengan berbagai investor utama melalui pelaksanaan *investor meeting* dalam format bilateral dan grup dengan sejumlah investor utama global, antara lain HSBC, Barclays, Bank of America, Nomura, RHB Securities, BNP Paribas, serta *engagement* dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's dan Fitch.

Bank Indonesia secara aktif mendukung dan memfasilitasi kegiatan promosi investasi dan perdagangan internasional melalui integrasi fungsi *Investor Relation Unit* (IRU) – *Regional Investor Relation Unit* (RIRU) – *Global Investor Relation Unit* (GIRU) yang bersifat *synergized*, *targeted*, dan *outcome oriented*. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah memfasilitasi penyelenggaraan 17 kegiatan promosi yang terdiri dari 11 promosi perdagangan di luar negeri yang diikuti oleh 207 UMKM binaan/mitra Bank Indonesia di 36 provinsi, serta 6 kegiatan promosi investasi yang



North Sulawesi Investment Forum (NSIF) 2023 di Manado

mempromosikan 71 proyek IPRO (*investment project ready to offer*) di 14 provinsi.

Kredibilitas Bank Indonesia juga senantiasa ditunjukkan melalui perolehan berbagai penghargaan internasional pada triwulan III 2023. Pada *Contact Center World APAC Region 2023* yang dilaksanakan pada 24 – 28 Juli 2023, Bank Indonesia meraih penghargaan 9 *Gold*, 3 *Silver*, dan 1 *Bronze* atas layanan *contact center* BI Bicara. Selain itu, QRIS sebagai *game changer* pembayaran digital yang merupakan kebijakan Bank Indonesia, juga meraih penghargaan *Indonesia Recognition of Excellence 2023* oleh OpenGov Asia. Organisasi internasional OpenGov Asia menilai QRIS telah berdampak pada transformasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. QRIS dipandang sebagai *powerful tool* yang dapat mendukung digitalisasi dan integrasi regional.

27) Optimalisasi *Local Currency Transaction* (LCT) dalam transaksi ekonomi dan keuangan bilateral, yang tecermin dari: (i) pangsa nilai transaksi yang penyelesaiannya menggunakan mata uang lokal terhadap total nilai perdagangan RI dengan negara mitra dan (ii) volume transaksi *cross border payment*

Bank Indonesia terus meningkatkan optimalisasi penggunaan mata uang lokal guna mendorong optimalisasi pemanfaatan LCT pada perdagangan bilateral. Pada triwulan III 2023, pangsa total transaksi penggunaan mata uang lokal terhadap total nilai perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara mitra terus meningkat. Transaksi ini berasal dari perdagangan Indonesia dengan empat negara yaitu Malaysia, Jepang, Thailand, dan Tiongkok. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia juga melanjutkan upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan LCT

melalui sosialisasi secara proaktif dan *targeted* kepada pelaku usaha, antara lain pada *side event Indonesia-China Business Forum* di Beijing.

Pada 5 September 2023, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di Jakarta, Bank Indonesia bersama kementerian dan lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra. Satgas ini melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, OJK, dan LPS. Pembentukan Satgas Nasional tersebut diwujudkan melalui penandatanganan NK antar lembaga tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra.

28) Sinergi memperjuangkan posisi Indonesia di fora internasional pada berbagai area strategis yang tecermin dari diterimanya posisi/*stances* Bank Indonesia di berbagai area strategis yang diterima di fora/lembaga/kerja sama internasional

Bank Indonesia senantiasa berupaya memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Republik Indonesia melalui diplomasi dan/atau negosiasi di fora/ lembaga/kerja sama internasional. Pada triwulan III 2023, tercatat sejumlah posisi/*stances* Bank Indonesia telah diterima di fora/lembaga/kerja sama internasional yang mencakup area stabilitas makroekonomi dan

sistem keuangan, sistem pembayaran/digital, ekonomi dan keuangan syariah, serta inklusi ekonomi.

Pada forum kerja sama multilateral, Bank Indonesia terus memperjuangkan kepentingan Indonesia pada forum G20, IMF, dan BIS. Pada forum G20 dan IMF, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyampaikan dukungan pada program pengentasan kemiskinan (*Poverty Reduction and Growth Trust - PRGT*) yang bertujuan untuk membantu negara berpenghasilan rendah untuk mencapai stabilitas ekonomi guna mengurangi kemiskinan. Pada forum BIS, Gubernur Bank Indonesia kembali dipercaya menjadi Ketua 3 - Bank for International Settlements (ACC-BIS) mulai 26 September 2023 hingga satu tahun ke depan.

Pada forum kerja sama regional, selain berperan aktif dalam Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, Bank Indonesia juga melanjutkan partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan, antara lain pada Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan The South East Asian Central Banks (SEACEN). Pada berbagai forum tersebut, Bank Indonesia menyampaikan sejumlah posisi mengenai perkembangan kondisi *macro-financial*, peran bank sentral dalam mendorong *sustainable finance*, serta merespons isu *climate change* dan digitalisasi. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam kerja sama peningkatan kapasitas kelembagaan dan kebansentralan dalam forum SEACEN.

Selain berdiplomasi di berbagai fora/lembaga internasional, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya. Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC)/ Bank Sentral Tiongkok menyepakati kerja sama di area kebansentralan melalui penandatanganan NK oleh Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur PBoC di Beijing pada 27 September 2023. Kerja sama ini meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan dan sistem pembayaran, termasuk inovasi digital dalam sistem dan jasa pembayaran, kerangka pengaturan dan pengawasan dalam konteks anti pencucian uang/pemberantasan pendanaan terorisme, serta bidang lain yang disepakati.

Bank Indonesia dengan bank sentral mitra juga terus memperkuat kerja sama yang lebih terstruktur dan sistematis dalam kerangka *Structured Bilateral Cooperation* (SBC). Sepanjang triwulan III 2023, Bank Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program dalam kerangka SBC dengan berbagai bank sentral mitra, di antaranya kegiatan *Technical*

Level Meeting (TLM) dengan Deutsche Bundesbank untuk membahas program implementasi dan area penguatan kerja sama ke depan serta *Technical Level Policy Dialogue* dan *Discussion on Recent Economic Development* yang membahas perkembangan dan kebijakan perekonomian di kedua negara. Selain itu, guna mendukung implementasi agenda prioritas G20 terkait "Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran di Digital Era" yang diturunkan menjadi *Priority Economic Deliverables* (PED) Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, telah dilaksanakan *Technical Discussion* (TD) on *Payment System Ecosystem using QR Code in Japan* dan *TD on Crypto-based Financial Service Supervision* dengan The Federal Reserve Bank of New York. Sebagai bagian dari *side event* Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, Bank Indonesia dan Bank of England melaksanakan program implementasi berupa *ASEAN Workshop on Financial Stability*, yang didukung dengan kehadiran narasumber dari bank sentral mitra SBC di kawasan, yaitu MAS dan Reserve Bank of India.

29) Penyelenggaraan Keketuaan ASEAN dan ASEAN+3 (bersama Jepang) yang efektif dengan substansi yang mendukung kepentingan Bank Indonesia

Bank Indonesia mendukung penyelenggaraan Keketuaan ASEAN dan ASEAN+3 secara efektif. Dari sisi substansi, berbagai prioritas Keketuaan Indonesia telah disampaikan dan didukung oleh negara-negara anggota ASEAN, baik di level teknis (*working groups / working committees*), maupun AFCDM dan AFMGM, terkait pentingnya mengoptimalkan bauran kebijakan makroekonomi, kerangka transaksi mata uang lokal ASEAN, perluasan konektivitas pembayaran regional (RPC) di kawasan ASEAN, penguatan inklusi dan literasi keuangan digital, serta peninjauan kembali mandat komite kerja.

Pada 25 Agustus 2023 di Jakarta, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyelenggarakan *The 10th Joint Meeting of AFMGM*. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan yang bertujuan untuk memantau dan memperbarui perkembangan berbagai capaian dalam *Priority Economic Deliverables* (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN. Tiga PED di bawah kerangka kerja sama sektor keuangan terdiri dari (i) mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi (*Recovery-Rebuilding*), (ii) memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi, dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (*Digital Economy*), dan (iii) mempromosikan pembiayaan



Pertemuan Senior Level Committee (SLC) ke-26 ASEAN di Bali

transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*Sustainability*).

Selanjutnya, dari sisi penyelenggaraan *event*, keberhasilan penyelenggaraan rangkaian acara tecermin dari indeks kepuasan *stakeholder* terhadap penyelenggaraan *event* yang terjaga baik. Kesuksesan ini didukung antara lain oleh manajemen *meeting* yang efektif dengan dukungan teknologi, *hospitality program* yang terkonsep dan terencana, serta dukungan tim *liaison officer* yang mampu merepresentasikan Indonesia dengan baik.

PS 10 Memperkuat efektivitas kebijakan kelembagaan guna mencapai kinerja unggul untuk mendukung kredibilitas Bank Indonesia

30) Pengembangan bauran kebijakan kelembagaan (BKK) untuk memperkuat kinerja unggul Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat kerangka BKK berbasis efektif, efisien, dan kepatuhan/*compliance* untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bank Indonesia. Hal tersebut di antaranya dilakukan melalui penerbitan ketentuan tentang Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang menjadi dasar perumusan kerangka kerja BKK. Penguatan kelembagaan dimaksud mencakup penajaman Visi, Misi, dan 12 Program Strategis Bank Indonesia, serta konsepsi perencanaan strategis, sebagai tindak lanjut perluasan tujuan, dan penajaman

tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Implementasi BKK dan asesmen kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan merupakan *evolving process* yang akan terus dipertajam dan didukung dengan implementasi *digital business process reengineering* secara bertahap dalam proses asesmen dan perumusan bauran kebijakan.

31) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Bank Indonesia kembali memperoleh opini WTP atas LKTBI tahun 2022 dari BPK-RI. Opini WTP tersebut berhasil didapatkan oleh Bank Indonesia selama 20 tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa mewujudkan tata kelola yang baik dan konsisten serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna menjaga kredibilitas sebagai bank sentral.

32) Maturitas Tata Kelola Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas yang terefleksikan dari tingkat maturitas tata kelola di Bank Indonesia. Maturitas tata kelola tersebut mencakup maturitas *Good Governance*, Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI), Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI), Internal Audit, dan Pengadaan. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan maturitas tata kelola, antara lain melalui internalisasi

ketentuan tentang Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia, pemantauan tindak lanjut sejumlah rekomendasi penguatan tata kelola pada periode sebelumnya, dan memulai sejumlah proses penilaian maturitas.

33) Penerbitan peraturan sebagai amanat Undang-Undang serta landasan hukum kebijakan dan kelembagaan

Bank Indonesia terus memastikan keselarasan penerbitan peraturan sesuai amanat Undang-Undang, termasuk UU P2SK, serta landasan hukum untuk kebijakan utama dan kelembagaan. Hingga triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menerbitkan 50 peraturan, baik yang berlaku bagi internal maupun eksternal, termasuk peraturan yang diamanatkan oleh UU P2SK.

Dalam menerbitkan peraturan dan sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum yang mendukung efektivitas kebijakan, proses pembentukan peraturan Bank Indonesia dilakukan melalui: (i) asesmen hukum secara komprehensif di area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan serta (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar peraturan yang diterbitkan senantiasa sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya. Proses ini juga memastikan keselarasan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penyusunan dan penerbitan peraturan sesuai rencana.

Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam pembahasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Bank Indonesia. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia ikut serta dalam pembahasan: (i) RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik, (ii) RUU Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (iii) RUU Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (iv) RUU Pemerintahan Digital, serta (v) RPP yang merupakan amanat UU P2SK (antara lain RPP Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh LPS dan RPP Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto), baik sebagai anggota PAK maupun sebagai otoritas terkait. Di samping itu, Bank Indonesia juga aktif dalam pembahasan PP No.34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan sebagai anggota PAK.

34) Kualitas komunikasi dan pemenuhan transparansi informasi publik, yang tecermin dari: (i) tingkat keterlibatan *stakeholder* dan (ii) kategori pemingkatan Transparansi Badan Publik

Sebagai badan publik, Bank Indonesia berkomitmen untuk memenuhi amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), antara lain dengan mewujudkan kemudahan akses layanan informasi kepada publik melalui berbagai inovasi dari sisi manusia, proses, dan teknologi. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan terbukanya akses informasi bagi berbagai pihak melalui layanan *contact center* BI BICARA, termasuk kunjungan langsung ke layanan informasi publik yang berlokasi di *Visitor Center* Bank Indonesia yang juga ramah bagi penyandang disabilitas.

Pada periode triwulan III 2023, fokus komunikasi Bank Indonesia adalah terus mengelola ekspektasi terkait bauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, guna mendorong pertumbuhan dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan komunikasi mengenai hasil penyelenggaraan ASEAN *Chairmanship* Jalur Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. Fokus komunikasi lainnya adalah terkait akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital dengan didukung perlindungan konsumen yang kuat, serta transformasi kelembagaan Bank Indonesia.

Dalam rangka memastikan tingkat keterlibatan *stakeholder* selalu terjaga baik sekaligus memperoleh masukan dari *stakeholder*, Bank Indonesia senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. *Stakeholder* tersebut di antaranya parlemen, kementerian/ lembaga, ekonom, akademisi, lembaga riset, dan media massa.

Komunikasi Bank Indonesia dilakukan baik melalui kanal *website*, media sosial, dan media massa, maupun melalui konferensi pers, taklimat media, pertemuan atau FGD, program kunjungan ke Bank Indonesia, dan layanan informasi publik. Komunikasi di kanal media sosial menarik perhatian warganet dimana sekitar 292.773 orang menyaksikan *livestreaming* kebijakan yang telah dikomunikasikan. Bank Indonesia juga konsisten melakukan kegiatan edukasi publik salah satunya melalui Museum Bank Indonesia (MuBI). Sepanjang triwulan III 2023, edukasi Bank Indonesia diikuti oleh lebih dari 138.949 peserta.

Komunikasi yang dilakukan Bank Indonesia mampu mengarahkan persepsi publik dan terbentuknya



Bank Indonesia Mengajar 2023: “Peran dan Tugas Bank Sentral dalam Perekonomian Nasional Menuju Indonesia Maju” di Surakarta

persepsi publik yang *favorable* atas kebijakan Bank Indonesia. Tingkat dukungan *stakeholder* terhadap kebijakan Bank Indonesia yang sudah dikomunikasikan dan dipublikasikan di media massa nasional, tecermin dari persepsi positif mayoritas *stakeholder* yang dimuat di media massa nasional serta *headline* positif dari media.

Selain itu, pada triwulan III 2023, Bank Indonesia juga mendapat sejumlah pengakuan dan apresiasi dari komunitas nasional, antara lain (i) penghargaan 9 *Gold*, 3 *Silver*, dan 1 *Bronze*, atas layanan *contact center* BI BICARA pada Contact Centre World Asia Pacific (CCW APAC) yang dilaksanakan tanggal 24-28 Juli 2023, (ii) penghargaan atas layanan informasi publik Bank Indonesia terhadap penyandang disabilitas dari Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 September 2023, (iii) penghargaan 7 *Platinum*, 3 *Gold*, 3 *Silver*, dan 4 *Bronze*, atas layanan informasi publik dan *contact center* BI BICARA pada ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang dilaksanakan tanggal 26 September.

Selanjutnya, dalam memastikan implementasi pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, di antaranya melalui forum edukasi, *workshop* pemutakhiran informasi, dan berbagai kegiatan lain. Sebagaimana diatur dalam UU dan peraturannya, Bank Indonesia telah melakukan pemutakhiran informasi dan mengumumkan daftar informasi publik yang

dimutakhirkan tersebut pada situs Bank Indonesia agar mudah diakses oleh publik. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud komitmen Bank Indonesia sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel.

Program Strategis (PS) 11 Meningkatkan kinerja efisien melalui pengelolaan organisasi dan proses kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia

35) Penguatan proses bisnis yang efektif, efisien dan bertata-kelola yang selaras dengan era digital melalui digitalisasi *Business Process Reengineering* (BPR) pada area *Decision Making Process* (DMP) Rapat Dewan Gubernur (RDG)

Bank Indonesia mengembangkan *platform Digital Workplace* sebagai inisiatif *business process reengineering* pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan *compliance* berbasis teknologi digital. Pada tahun 2023, pengembangan *platform Digital Workplace* dilakukan secara *continuous* didukung dengan langkah-langkah *change management*, antara lain penguatan pedoman, sosialisasi, dan penerapan masa transisi uji coba. Pada triwulan III 2023, *piloting Digital Workplace* untuk *use case* RDG Bulanan yang telah dilakukan sejak triwulan sebelumnya akan dilanjutkan untuk *use case* RDG lainnya. Pengembangan sistem juga didukung dengan penguatan aspek *people* dan *process*, serta senantiasa diperbarui selaras dengan perkembangan teknologi.

36) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan bermotivasi tinggi yang tecermin dari tingkat *person to job fit*

Pemenuhan SDM yang kompeten dan bermotivasi tinggi tecermin dari kesesuaian *branding* dan kompetensi terhadap persyaratan jabatan (*person to job fit*). Tingkat *person to job fit* Bank Indonesia hingga akhir triwulan III 2023 telah mencapai 93,93% dan akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2023. Pencapaian *person to job fit* merupakan bagian dari strategi pemenuhan internal Bank Indonesia melalui reposisi (mutasi dan rotasi pegawai secara berkala), penugasan pegawai ke lembaga eksternal, serta pengembangan pegawai dengan memperhatikan kesesuaian antara atribut pegawai dan atribut jabatan.

Dalam rangka pengembangan pegawai, sampai dengan triwulan III 2023 Bank Indonesia melaksanakan Program Meningkatkan Kompetensi (PMK), baik secara *offline* maupun *online* atau *distance learning*, dengan cakupan materi, antara lain topik kebanksentralan, *leadership*, *general management*, *digital economy* dan *digital technology*. PMK tersebut diikuti oleh 6.057 peserta dari berbagai level golongan pegawai, yang dilaksanakan dalam 160 kelas IHT dengan 98 topik IHT. Bank Indonesia juga terus melanjutkan upaya pengembangan SDM melalui kebijakan New Program Tugas Belajar (PTB).

Program Strategis (PS) 12 Meningkatkan kinerja efisien organisasi melalui Sistem Informasi (SI) yang unggul, logistik yang prima, dan pengadaan yang kredibel

37) Digital business technology platform Bank Indonesia yang andal, highly available, dan aman untuk mendukung kinerja efisien organisasi dan proses bisnis, yang tecermin dari (i) tingkat maturitas Information Technology Service Management (ITSM) dan (ii) pemenuhan standar availability berdasarkan kategori kritikalitas

Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan *digital business technology platform* yang andal, *highly available*, dan aman untuk mendukung kinerja efisien organisasi dan proses bisnis. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pada triwulan III 2023, Bank Indonesia:

- a) Melakukan implementasi digitalisasi Bank Indonesia sesuai RIVIBI melalui pengembangan *Digital Workplace*, pengembangan infrastruktur yang 3I (*integrated, interoperable, interconnected*), pengembangan Rupiah Digital, dan Pusat Data.

- b) Melanjutkan upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sistem informasi melalui penerapan *best practice Information Technology Service Management (ITSM)* dan *cyber security*. Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia mendapatkan capaian maturitas ITSM dan *cyber security* yang cukup baik. Capaian ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memastikan keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi, termasuk layanan sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat.
- c) Melanjutkan upaya terpenuhinya standar *availability* melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat teknologi, simulasi pemulihan insiden secara berkala, dan penyempurnaan proses pengelolaan layanan, guna meningkatkan reliabilitas layanan.

38) Ketersediaan data dan statistik Bank Indonesia yang Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU) untuk kebutuhan seluruh stakeholder Bank Indonesia nasional dan internasional

Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan data dan statistik agar dapat dipublikasikan secara tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *stakeholder*, baik nasional maupun internasional. Publikasi statistik Bank Indonesia merupakan bentuk pemenuhan *service* kepada *stakeholder* nasional dan komitmen keanggotaan pada berbagai lembaga/fora internasional seperti IMF, BIS, G20, World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN.

Pada triwulan III 2023, Bank Indonesia telah menerbitkan rata-rata 51 publikasi statistik setiap bulan pada periode Juli s.d. Agustus 2023 yang dipublikasikan melalui *website* Bank Indonesia dan 14 statistik yang disampaikan kepada lembaga internasional. Publikasi tersebut antara lain: (i) Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II 2023, (ii) Laporan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia Triwulan II 2023, (iii) Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Mei-Juli 2023, (iv) Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Triwulan II 2023, (v) Informasi Cadangan Devisa dan Indikator Moneter periode Juni-Agustus 2023, (vi) Perkembangan Uang Beredar periode Juni-Agustus 2023, (vii) Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Juni-Agustus 2023, (viii) Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Juni-Agustus 2023 pada 34 Provinsi di Indonesia, (ix) Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran (ITEMS) secara mingguan dengan periode

terkini pada Minggu III September 2023, (x) Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Mei – Juli 2023, serta (xi) Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) Juni-Agustus 2023. Adapun produk statistik SULNI dan SUSPI merupakan *joint publication* dengan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Bank Indonesia juga memublikasikan beberapa laporan hasil survei seperti Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan, Perkembangan Properti Komersial (PPKom), Survei Perbankan (SBank), serta *Prompt Manufacturing Index* (PMI).

Sementara itu, data dan statistik yang secara langsung disampaikan kepada lembaga/fora internasional, antara lain mencakup: (i) BIS terkait *Credit and Money, Balance of Payments and International Trade*, dan *Locational Banking Statistics* (LBS), (ii) IMF terkait *Balance of Payments* (BOP), *International Investment Position* (IIP), *Exchange Rates, International Reserves and Foreign Currency Liquidity* (IRFCL), *Coordinated Portfolio Investment Survey* (CPIS), *Financial Soundness Indicators* (FSI), *Money & Banking* (SRF), *Analytical Accounts of the Banking Sectors*, dan *Analytical Accounts of the Central Bank*, serta (iii) OECD terkait *Consumer Opinion Surveys, Interest Rates*, dan *Monetary Aggregates*. Dalam rangka menjaga komitmen diseminasi data internasional, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Pemerintah terkait yaitu BPS dan Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan telah dimulainya rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan rekomendasi G20 *Data Gaps Initiative* (DGI) *phase 3*, Bank Indonesia merupakan sekretariat antarinstansi pada DGI-3 rekomendasi 10 s.d. 14, sekaligus anggota pada beberapa rekomendasi. Bank Indonesia secara aktif menghadiri sejumlah pertemuan *kick-off* serta *workshop* rekomendasi secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh organisasi internasional dan memberikan masukan yang konstruktif mewakili kepentingan Indonesia. Bank Indonesia secara berkesinambungan mendukung pemenuhan berbagai rekomendasi di tahun 2023, antara lain melalui pengisian *stock taking questionnaire* dan *concept note*, serta menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk mengawal pemenuhan rekomendasi DGI-3.

Dalam rangka menjaga kualitas publikasi statistik dan ketersediaan data, Bank Indonesia secara

berkesinambungan terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait. Pada triwulan III 2023, telah dilakukan sejumlah FGD dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan asesmen dan penyempurnaan statistik.

Bank Indonesia juga melanjutkan kolaborasi dan koordinasi erat dengan OJK dan LPS dalam perluasan metadata LBUT BI-ANTASENA yang telah diimplementasikan secara penuh pada 3 Januari 2022. Koordinasi bersama kedua otoritas tersebut dilakukan dalam Forum Integrasi Pelaporan (FIP). Sejak September 2023, telah dilakukan perluasan metadata LBUT yang mencakup antara lain: (i) perluasan dalam rangka tindak lanjut penerbitan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (RIM PLM) serta (ii) perluasan dalam rangka tindak lanjut penerbitan ketentuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

39) Pengelolaan kelogistikan sesuai standar untuk mendukung kinerja efisien Bank Indonesia

Pengelolaan kelogistikan Bank Indonesia berjalan dengan baik. Pada triwulan III 2023, pelaksanaan proyek strategis difokuskan pada pembangunan tahap awal Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) di IKN melalui pemenuhan pelaksana pekerjaan *design and build*, persiapan *groundbreaking*, serta upaya pemenuhan persyaratan pembangunan, khususnya aspek legal dan lingkungan. Selanjutnya, Bank Indonesia juga secara bertahap mengimplementasikan *modern office*, yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ruang kolaborasi dan komunikasi guna meningkatkan produktivitas dan kreativitas pegawai.

Arah kebijakan kelembagaan di bidang pengelolaan kelogistikan pada tahun 2023 berfokus pada implementasi *Framework* Pengelolaan Kelogistikan yaitu mendukung visi Bank Indonesia melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelogistikan yang Prima, dengan strategi utama: (i) perencanaan dan perancangan yang terintegrasi, (ii) penyediaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, serta (iii) pelayanan, pengamanan dan penyelamatan yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan dengan senantiasa melaksanakan strategi dan implementasi sesuai Rencana Induk Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (RIKOPERBI), Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia (RIPABI), dan Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia (RIPAMBI).

40) Implementasi *e-Catalogue* untuk meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa

Implementasi *e-Catalogue* telah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan melalui dukungan digitalisasi pengadaan. Nilai transaksi *e-Catalogue* pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan sebesar 695% dari nilai transaksi selama 2022. Selain nilai transaksi, Bank Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan *vendor e-Catalogue*. Hingga triwulan III 2023, jumlah *vendor e-Catalogue* Bank Indonesia meningkat 22% dari jumlah *vendor* pada tahun 2022. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa di Bank Indonesia, sampai dengan saat ini *e-Catalogue* telah menyediakan 3.442 produk yang terdiri dari 2.144 produk UMKM dan 1.298 produk non-UMKM. Produk tersebut meliputi antara lain makanan dan minuman,

kerajinan, *fashion*, perabot, alat tulis kantor, serta pemuatan materi komunikasi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus meningkatkan nilai transaksi, jumlah *vendor* dan produk dalam *e-Catalogue* secara bertahap dengan tetap memperhatikan keterlibatan UMKM di dalamnya.

Bank Indonesia juga senantiasa menerapkan berbagai strategi untuk mewujudkan perencanaan dan pengadaan yang terintegrasi, modern, dan digital untuk meningkatkan efisiensi, tata kelola yang baik, dan berkelanjutan. Guna mendukung kebijakan tersebut, Bank Indonesia menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu di bidang pengadaan barang dan/atau jasa sejak tahun 2021 untuk memastikan pengadaan Bank Indonesia dilakukan secara profesional, dan menerapkan tata kelola yang baik.



Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur



BAB 5

Dewan Gubernur dan Kelembagaan Bank Indonesia



Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 yang kemudian beberapa kali diubah dan diperkuat terakhir melalui UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Bank Indonesia memiliki tiga tujuan, yakni: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah, (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat *collective collegial* dan melaksanakan Rapat Dewan Gubernur untuk memutuskan hal-hal yang bersifat prinsipil dan strategis. Rapat Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia dan sejalan dengan sifat *collective collegial* dari Dewan Gubernur, maka setiap keputusan Rapat Dewan Gubernur mengikat keseluruhan Anggota Dewan Gubernur.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama 20 tahun berturut-turut. Hal ini merupakan pembuktian atas komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan.

Status, Tujuan, dan Tugas

STATUS

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksanaan undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

TUJUAN

Bank Indonesia memiliki tiga tujuan, yakni: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah, (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan nilai Rupiah terhadap harga barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah terhadap harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Stabilitas sistem pembayaran adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Stabilitas sistem pembayaran tecermin dari penyelenggaraan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia bersinergi dan berkoordinasi dengan otoritas keuangan lainnya dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal. Hal ini bertujuan agar sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.

TUGAS

Dalam upaya mencapai tujuannya, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Visi dan Misi

VISI

BANK INDONESIA

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju.”



MISI

BANK INDONESIA

01

Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

02

Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

03

Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

04

Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.

05

Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

06

Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.

07

Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.



Taman Milenial Kantor Pusat Bank Indonesia

Dewan Gubernur



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023, dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional, jabatan yang diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the South-East Asia Voting Group (SEAVG), IMF Washington DC, USA. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini menduduki posisi sebagai *Chair* dari The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement (ACC-BIS), *Chairman Executive*

Committee (EC) dari Islamic Financial Service Board (IFSB), Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) *Meeting*, serta di International Monetary Fund (IMF), ASEAN, ASEAN+3, Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Islamic International Liquidity Management (IILM). Selama tahun 2022, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya "*Central Bank Policy: Theory and Practice*" yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior

DESTRY DAMAYANTI resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Selain itu, saat ini Destry merupakan Anggota Dewan Komisioner (*ex-officio*) Bank Indonesia pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2015-2019.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia pada tahun 1987-1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992-1997. Pada tahun 1997-2000, Destry Damayanti menjadi ekonom di Citibank yang kemudian

diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 - 2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut menjadi Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005-2015 dan sekaligus menjadi Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute. Selama tahun 2014 - 2015, Destry juga menjabat sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi pada Kementerian BUMN. Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of Science dari *Field of Regional Science*, Cornell University, New York, AS pada tahun 1992.



Doni Primanto Joewono

Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, Doni Primanto Joewono memulai penugasannya di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Doni Primanto Joewono pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta, dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, Doni Primanto Joewono bersama kepala daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017), serta banyak

menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia tahun 2020.

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh di Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta Administrasi dan Pengembangan SDM Universitas Indonesia (UI) tahun 2004 untuk gelar Magister. Doni Primanto Joewono mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (antara lain IMF dan SEACEN).



Juda Agung

Deputi Gubernur

JUDA AGUNG menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) ASEAN dan Pasifik, di Washington DC, AS yang mewakili 13 negara anggota.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Juda Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan khususnya di bidang kebijakan moneter maupun

makroprudensial, manajemen strategis, hingga Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebagai ekonom, Juda Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru saja diterbitkan Juda Agung adalah buku "Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi".

Juda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Juda Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Juda Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 1999.



Aida S. Budiman Deputi Gubernur

AIDA S. BUDIMAN resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasi bauran kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia, perumusan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daerah, serta mendorong peran

digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga.

Aida S. Budiman juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan/atau lembaga maupun dalam organisasi profesional, serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta pernah bertugas sebagai *Alternate Executive Director (AED) SEAVG, IMF Washington DC, USA*.

Aida S. Budiman Lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan di bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan mendapatkan gelar Master di bidang *Economics* pada tahun 1996. Aida S. Budiman juga melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta

Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan diambil sumpahnya pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023-2028.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak tahun 1986, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta merupakan Asisten Gubernur bidang sistem pembayaran yang memimpin transformasi sistem pembayaran nasional. Filianingsih Hendarta merupakan sosok penting yang mengawal peluncuran Proyek Garuda yang memayungi eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital, serta memimpin implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 sebagai percepatan transformasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan.

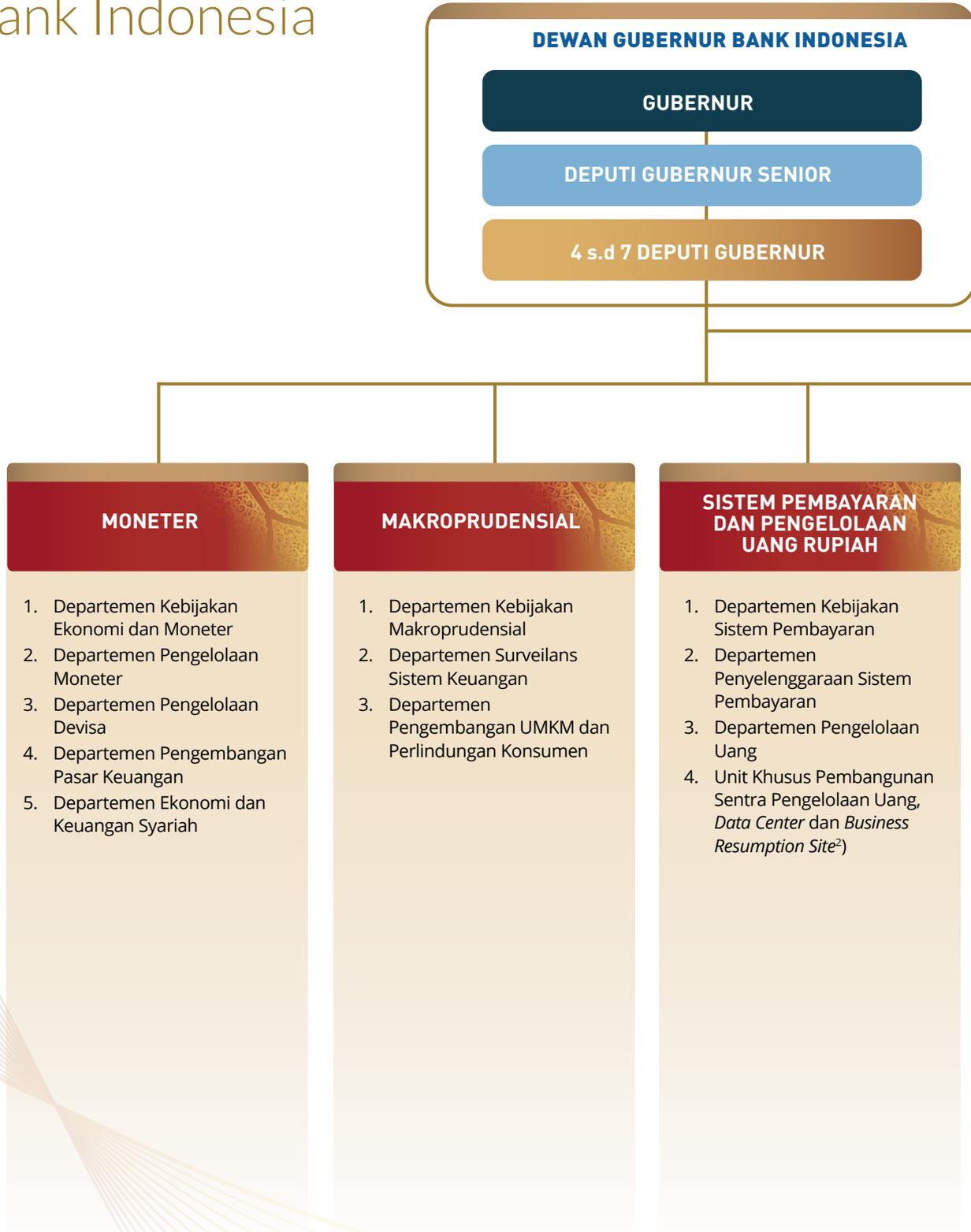
Filianingsih Hendarta berpengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, memimpin berbagai proyek berskala nasional maupun internasional, dan mewakili Bank Indonesia di berbagai fora internasional. Atas dedikasi dan prestasinya, Filianingsih Hendarta dipercaya sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023), Kepala Departemen Kebijakan

Makroprudensial (2015–2019), serta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013 – 2015).

Filianingsih Hendarta terlibat aktif dalam berbagai forum lintas kementerian dan lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum antara lain Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acap kali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora seperti G20, BIS, FSB, IMF, World Bank, ECB, dan EMEAP.

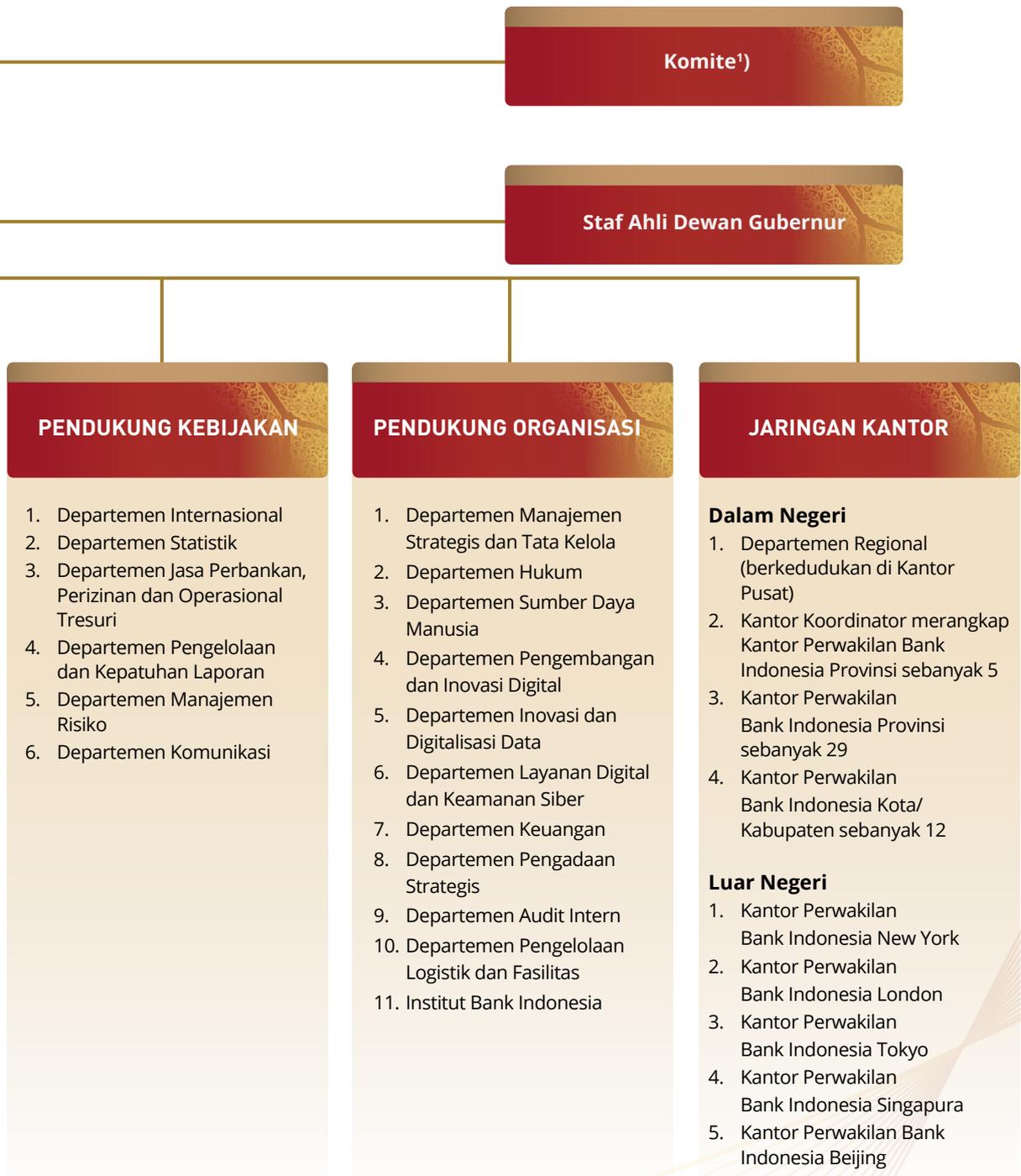
Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan di bidang Hukum Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group* Moneter dan Makroprudensial pada tahun 2018 – 2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.

Struktur Organisasi Bank Indonesia



Keterangan:

- 1) Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur
- 2) Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara

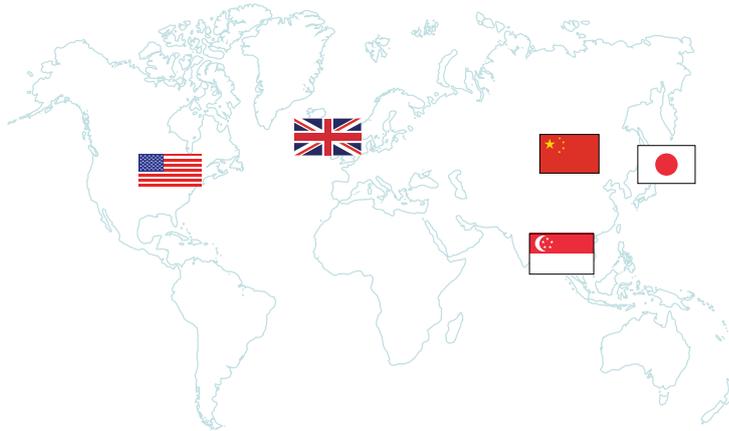


Peta Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia



**Kantor Perwakilan
Luar Negeri**

- London
- New York
- Singapura
- Tokyo
- Beijing



**KPw Koordinator
Wilayah Bali Nusra merangkap
KPw Provinsi Bali**

- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur

**KPw Koordinator
Wilayah Sulampua merangkap
KPw Provinsi Sulawesi Selatan**

- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Papua
- Provinsi Maluku
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 6

Badan Supervisi Bank Indonesia



Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BSBI bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI dan berkedudukan di luar struktur organisasi Bank Indonesia. Fungsi BSBI dalam membantu fungsi pengawasan DPR-RI di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia.

Susunan keanggotaan BSBI untuk periode 2023-2028 yang terpilih berdasarkan proses uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) oleh DPR RI pada tahun 2023 terdiri atas: Muhammad Nawir Messi sebagai Ketua merangkap Anggota, serta Iskandar Simorangkir sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, dan Agus Herta Sumarto, Irwan Lubis, Marwanto Harjowiryo, Mohamad Khusaini, dan Piter Abdullah Redjalum masing-masing sebagai Anggota.

Profil Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2026



Muhammad Nawir Messi
Ketua

MUHAMMAD NAWIR MESSI lahir di Makassar pada tahun 1957, memperoleh gelar Master dan Diploma dari the Australian National University, Australia dan Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Hasanudin, Indonesia.

Muhammad Nawir Messi diangkat menjadi Ketua BSBI untuk periode 2023-2028, berlanjut dari periode yang lalu sebagai Anggota BSBI periode 2020-2023. Sebelumnya, Muhammad Nawir Messi menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Pendiri sekaligus Ketua ASEAN Expert Group on Competition dan ASEAN High Level Meeting on Competition, Pendiri sekaligus *Managing Director* Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta konsultan dan peneliti di berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, Foundation for Advance Studies on International Development, Tokyo, Asian Development Bank, United Nation Conference on Trade and Development, Center for Policy and Implementation Studies – lembaga kerja sama antara Harvard Institute for International Development dengan Pemerintah Indonesia, serta mengajar di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

ISKANDAR SIMORANGKIR lahir di Binjai pada tahun 1963. Iskandar Simorangkir memperoleh gelar S3 di bidang Ekonomi Moneter dan Perbankan dari Universitas Indonesia, setelah sebelumnya meraih gelar Master of Art (MA) di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, USA dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

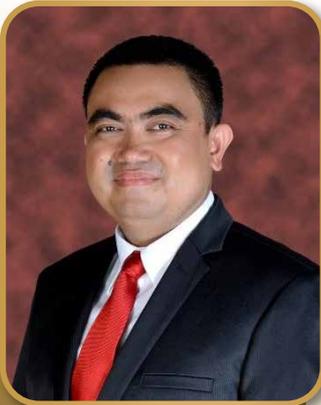
Saat ini, Iskandar Simorangkir diamanahkan sebagai Wakil Ketua BSBI untuk periode 2023-2028. Iskandar Simorangkir juga menjabat sebagai Tim Ahli di bidang Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak 1 Februari 2023. Sebelumnya, Iskandar Simorangkir menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2017 – 2023) dan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (2014 – 2016).

Iskandar Simorangkir merupakan Kepala (Direktur Eksekutif) Pusat Penelitian dan Edukasi Kebanksentralan Bank Indonesia (2012-2014), menjabat sebagai Kepala Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia (2008-2012), serta menjabat sebagai peneliti ekonomi (1998-2012).

Iskandar Simorangkir juga aktif sebagai anggota Dewan Editor Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan serta menulis sejumlah buku, makalah dan artikel di jurnal dan surat kabar di bidang makroekonomi, moneter, kebanksentralan dan internasional.



Iskandar Simorangkir
Wakil Ketua



Agus Herta Sumarto
Anggota

AGUS HERTA SUMARTO, lahir di Bandung pada tahun 1985 dan menyelesaikan studi S3 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia (UI) dengan peminatan Manajemen Keuangan, S2 Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan S1 bidang Agribisnis di Universitas Mercu Buana (UMB). Agus Herta Sumarto saat ini merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana dengan bidang keahlian *Banking, Finance, Fiscal and Monetary Policy*, dan *Macroeconomics Analysis*.

Saat ini, Agus Herta Sumarto aktif sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk periode 2023-2028. Sebelumnya, Agus Herta Sumarto juga pernah aktif sebagai Tenaga Ahli untuk Badan Anggaran DPR RI (2020 - 2023), Komite Audit Perumda PAMJAYA (2021 - 2022), Komite Pemantauan Risiko PT. Food Station Tjipinang Jaya (2022 - 2023), *associate researcher* di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dan juga peneliti di Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia (2015 - 2021). Agus Herta Sumarto juga aktif sebagai Mitra Akademisi Departemen Komunikasi Bank Indonesia.

Agus Herta Sumarto merupakan penulis aktif kolom opini di berbagai media massa seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan, Media Indonesia, Koran Sindo, dan Majalah Infobank. Di samping itu, Agus Herta Sumarto juga aktif menulis beberapa buku dan sudah diterbitkan yaitu *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat* (2010), *Membangun Etika Masyarakat Islam Modern* (2016), *Manajemen Investasi* (2017), *Statistika Terapan* (2018), *Strategi Menguatkan Nilai Tukar Rupiah* (2020), *Statistika Terapan Pengolahan Data Time Series Menggunakan Eviews* (2021), dan *Mengenal Bank di Era Kaum Gen-Zer dan Milenial* (2021).

IRWAN LUBIS lahir di Binjai pada tahun 1963 dan meraih gelar S3 diraih dari Universitas Padjajaran pada tahun 2016, gelar master di Universitas Indonesia pada tahun 2004, dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 1988.

Saat ini, Irwan Lubis aktif sebagai anggota BSBI untuk periode 2023-2028. Sebelumnya, Irwan Lubis menjabat sebagai *Advisor Senior Strategic Committee*, dan juga sebagai Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2013-2017). Irwan Lubis mulai berkarir di Bank Indonesia sejak tahun 1991. Irwan Lubis telah diamanahkan berbagai posisi penting di Bank Indonesia antara lain sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada tahun 2013, Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Bank (2010-2013), Pengawas Bank Madya Senior (2009-2010), serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (2007-2009).



Irwan Lubis
Anggota



Marwanto Harjowiryono
Anggota

MARWANTO HARJOWIRYONO lahir di Yogyakarta pada tahun 1959. Marwanto Harjowiryono meraih gelar S3 dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2009, pendidikan S2 dari Vanderbilt University USA pada tahun 1991, dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UGM.

Saat ini, Marwanto Harjowiryono aktif sebagai anggota BSBI untuk periode 2023-2028. Marwanto Harjowiryono memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1983. Marwanto Harjowiryono pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, sekaligus merangkap sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan (2006 – 2009), Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal (2004 – 2006), Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI (2001 – 2004), dan Kepala Biro Analisa APBN (1991 – 2001).

Jabatan lain yang pernah diemban oleh Marwanto Harjowiryono yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan (2013 – 2019), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (2011-2013), serta Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Asia (ADB) (2009 – 2011).

MOHAMAD KHUSAINI lahir di Pasuruan pada tahun 1971 dan merupakan seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Mohamad Khusaini menyelesaikan pendidikan Doktor di Universitas Brawijaya di bidang *Public Finance* dan memperoleh pendidikan Magister di Andrew Young School of Policies Studies, Georgia State University, USA, dan sebelumnya meraih gelar *Master of Public Administration* dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya. Pendidikan lain yang diikuti oleh Mohamad Khusaini di antaranya *Oxford Executive Leadership Programme* dari University of Oxford, Inggris.

Saat ini, Mohamad Khusaini diamanahkan kembali menjadi anggota BSBI untuk periode 2023–2028, setelah menjabat sebagai Anggota BSBI periode 2020-2023. Mohamad Khusaini juga aktif di organisasi profesi sebagai PP ISEI pada *Focus Group* Fiskal dan Keuangan Daerah. Dalam bidang penelitian dan kajian, Mohamad Khusaini memiliki keahlian di bidang *Public Policy and Finance*, *Public Budgeting and Fiscal Management*, serta *Macroeconomics*.



Mohamad Khusaini
Anggota



Piter Abdullah Redjalum
Anggota

PITER ABDULLAH REDJALAM lahir di Lahat pada tahun 1963. Piter Abdullah Redjalum meraih gelar Doktor dalam bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010, gelar *Magister of Arts in Developmental Economics* dari International University of Japan (2000), dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (1993).

Saat ini, selain aktif sebagai Anggota BSBI periode 2023-2028, Piter Abdullah Redjalum juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Segara Research Institute (2022 - sekarang) dan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Tanah Pusaka (2015 - sekarang).

Sebelum mendirikan Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalum juga menjabat sebagai Direktur Riset di CORE Indonesia (2017-2022) dan menjadi Penasihat Riset untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia (2018-2019). Sebelum itu, Piter Abdullah Redjalum pernah menjabat sebagai anggota Pokja Makroekonomi Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN (2017-2019) dan Deputy Direktur di Bank Indonesia (2011-2017).



BANK INDONESIA



Lampiran

DAFTAR KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK INDONESIA TRIWULAN III 2023

Daftar Kebijakan Bank Indonesia Triwulan III 2023	Daftar Ketentuan Bank Indonesia Triwulan III 2023
<p>Juli</p>	
<p>Bank Indonesia mempertahankan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,50%.</p> <p>Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui: (i) intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i> (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, dan (ii) <i>twist operation</i> melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing. Mengeluarkan ketentuan terkait dengan instrumen penempatan DHE SDA pada sistem keuangan Indonesia dengan 3 prinsip yaitu: (i) sejalan dengan pengaturan dalam PP 36/2023, (ii) pemanfaatan DHE SDA tersebut untuk kebutuhan dalam negeri, (iii) jenis instrumen yang diperbolehkan tetap berdasarkan prinsip (i) dan (ii) dimaksud, serta sesuai perkembangan ekonomi dan pasar keuangan. Memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor hilirisasi minerba dan hilirisasi nonminerba (termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau. Penetapan besaran total insentif paling besar 4%, meningkat dari sebelumnya paling besar 2,8%, yang terdiri dari (i) insentif untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling besar 2%, meningkat dari sebelumnya 1,5%; (ii) insentif kepada bank penyalur kredit/pembiayaan inklusif ditingkatkan dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%, dengan rincian 1% untuk penyaluran kredit UMKM/KUR dan 0,5% untuk penyaluran kredit UMi; dan (iii) insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau menjadi paling besar 0,5%, meningkat dari sebelumnya 0,3%. Implementasi KLM dilakukan melalui pengurangan giro di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga sektor-sektor hilirisasi. Mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital, melalui: <ol style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) QRIS segmen usaha mikro (UMI) berdasarkan nominal per transaksi secara progresif: (i) transaksi sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dikenakan MDR 0%; dan (ii) transaksi di atas Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dikenakan MDR 0,3%, dengan masa berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. PADG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. PADG Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia Triwulan III 2023	Daftar Ketentuan Bank Indonesia Triwulan III 2023
<ul style="list-style-type: none"> b. Akselerasi QRIS melalui perluasan fitur QRIS Tuntas (Tarik Tunai Transfer Setor) dan perluasan QRIS antarnegara. c. Penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional dan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) dalam rangka Perayaan Kemerdekaan RI. <p>Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha untuk mendorong hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan dan perikanan), perumahan, pariwisata dan pembiayaan inklusif (UMKM, KUR, UMi) dan hijau. Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyukseskan Ketetapan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.</p>	

Daftar Kebijakan Bank Indonesia Triwulan III 2023	Daftar Ketentuan Bank Indonesia Triwulan III 2023
Agustus	
<p>Bank Indonesia mempertahankan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,50%.</p> <p>Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan melalui berbagai langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i> (DNDF). 2. Menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen OM (kontraksi) yang <i>pro-market</i> dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai <i>underlying</i>. 3. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga perbankan pada Sektor Perumahan dan Pariwisata. 4. Mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi kebijakan QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS) bersama dengan industri. b. Implementasi uji coba QRIS antarnegara dengan Singapura. 5. Menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan, dengan 5 (lima) fokus pencapaian, yaitu terkait bauran kebijakan, <i>local currency transaction</i>, <i>regional payment connectivity</i>, inklusi keuangan, dan <i>strengthening ASEAN finance process</i>. <p>Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.</p>	<p>Bank Indonesia menerbitkan:</p> <p>PBI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencabutan PBI Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan BI Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>

Daftar Kebijakan Bank Indonesia Triwulan III 2023	Daftar Ketentuan Bank Indonesia Triwulan III 2023
<p>September</p> <p>Bank Indonesia mempertahankan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 5,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 6,50%.</p> <p>Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i> (DNDF). 2. Implementasi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter yang <i>pro-market</i> dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik <i>portfolio inflows</i>, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai <i>underlying</i>. 3. Pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit UMKM. 4. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperluas akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara <i>targeted</i> kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya. b. Meningkatkan monitoring atas implementasi kebijakan QRIS baik QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS) maupun <i>Merchant Discount Rate</i> (MDR) QRIS untuk Usaha Mikro (UMI). c. Memperkuat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah, khususnya KKI Pemda, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. 5. Perluasan kerja sama dengan sejumlah bank sentral untuk penggunaan <i>Local Currency Transaction</i> (LCT) dalam perdagangan, investasi, pasar keuangan, dan perbankan, serta transaksi pembayaran antarnegara, dengan dukungan Satuan Tugas Nasional LCT. <p>Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.</p>	<p>Bank Indonesia menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PBI Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter. 2. PBI Nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan atas PBI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional. 3. PBI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. 4. PADG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PADG Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka. 5. PADG Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PADG Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter. 6. PADG Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka. 7. PADG Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PADG Nomor 22/24/PADG/2020 tentang <i>Standing Facilities</i>. 8. PADG Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. 9. PADG Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). 10. PADG Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. 11. PADG Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan <i>Self Regulatory Organization</i> di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia – <i>Scripless Securities Settlement System</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
BI-7 Day Reverse Repo Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sifatnya transaksional. Suku bunga ini digunakan dalam jual/beli Surat Berharga Negara antara Bank Indonesia dengan bank komersial di pasar uang. Surat berharga tersebut diperjualbelikan secara <i>repurchase agreement</i> (repo) dalam jangka waktu 7 hari.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
<i>Central Bank Digital Currency</i>	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
<i>Central Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
<i>Cross Border</i>	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
ETP <i>Multimatching</i>	Sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan dengan metode <i>multimatching</i> .
<i>Financial Market Infrastructure</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
Giro Wajib Minimum	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunannya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial	Insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM.

ISTILAH	PENJELASAN
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
Loan to Value	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
Local Currency Transaction	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Non Performing Loan	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
Online	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek	Pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank umum konvensional (BUK) untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank umum konvensional.
Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah	Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank umum syariah (BUS) untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh BUS.
Pro-growth	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pro-stability	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	Standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS Cross Border/Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standarisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.

ISTILAH	PENJELASAN
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif.
<i>Regional Payment Connectivity</i>	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, dan State Bank of Vietnam.
<i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
<i>Sandbox</i>	Upaya untuk dapat menjaga inovasi teknologi finansial di bisnis sistem pembayaran.
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
SIHALAL	<i>Platform</i> yang digunakan untuk mendaftarkan dan memantau progres dari pengajuan sertifikasi halal.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna (i) menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, (ii) mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran, dan/atau (iii) meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>Swap</i>	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

ISTILAH	PENJELASAN
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (<i>stakeholder</i>) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
<i>Twist Operation</i>	Kebijakan Bank Indonesia melalui pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder, melalui penjualan SBN tenor jangka pendek dan pembelian SBN tenor jangka panjang untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur <i>yield</i> SBN jangka panjang lebih landai.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
2EK	Efektif, Efsien, dan Kepatuhan
2S	Standardisasi dan Sertifikasi
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
5K	Kualitas, Kuantitas, Kapasitas, Kontinuitas, dan Kemas
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
ACI-FMA	ACI Financial Markets Association
ADB	Asian Development Bank
AFCDM	ASEAN Finance Ministers and Central Bank Deputies Meeting
AFMGM	ASEAN Finance and Central Bank Governors Meeting
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
AMS	<i>ASEAN Member States</i>
AP	<i>Administered Prices</i>
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	<i>Automated Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri</i>
Bansos	Bantuan Sosial

ISTILAH	PENJELASAN
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI7DRR	Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate
BI-CBS	Bank Indonesia – <i>Core Banking System</i>
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>
BI-IMOS	Bank Indonesia- <i>Integrated Monetary Operation System</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>
BIS	Bank for International Settlements
BI-SSSS	Bank Indonesia- <i>Scripless Securities Settlement System</i>
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BKU	Bauran Kebijakan Utama
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
Botasupal	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPPUR	<i>Blueprint</i> Pengelolaan Uang Rupiah
BPR	<i>Business Process Reengineering</i>
BPRS	Bank Perekonomian Rakyat Syariah
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

ISTILAH	PENJELASAN
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBS	<i>Core Banking System</i>
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCP SBNT	<i>Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CCW APAC	Contact Centre World Asia Pasific
CDM	<i>Cash Deposit Machine</i>
CMMI	<i>Capability Maturity Model Integration</i>
CPIS	<i>Coordinated Portfolio Investment Survey</i>
CPMI	Committee on Payments and Market Infrastructures
CRM	<i>Cash Recycle Machine</i>
Daring	Dalam Jaringan
DF	<i>Deposit Facility</i>
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
DXY	<i>US Dollar Index</i>
ECB	European Central Bank

ISTILAH	PENJELASAN
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEs	<i>Emerging Market Economies</i>
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETPD	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FERBI	Festival Rupiah Berdaulat Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FIP	Forum Integrasi Pelaporan
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FOMOBO	<i>Front Office, Middle Office, dan Back Office</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSI	<i>Financial Soundness Indicators</i>
FX	<i>Foreign Exchange</i>
G20	Group of Twenty
G20 DGI	<i>G20 Data Gaps Initiative</i>
G20 FMCBG	G20 Finance Ministers and Central Bank Governors
GBBI	Gerakan Bangga Buatan Indonesia
GFS	<i>Government Financial Statistics</i>
GMRA	<i>Global Master Repo Agreement</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GWM	Giro Wajib Minimum

ISTILAH	PENJELASAN
HERBITREN	Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren
HLP	<i>High Level Principles</i>
IFEMC	Indonesia Foreign Exchange Market Committee
IILM	Islamic International Liquidity Management
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards</i>
IFSB	Islamic Financial Service Board
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHT	<i>In House Training</i>
IIGMA	<i>Indonesia Islamic Global Market Association</i>
IIP	International Investment Position
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
INDEF	Institute for Development of Economics and Finance
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight <i>Index Average</i>
IOSCO	International Organization of Securities Commissions
IRFCL	<i>International Reserves and Foreign Currency Liquidity</i>
ISDA	International Swaps and Derivatives Association
IsDB	Islamic Development Bank
ISEI	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
ISO	International Organization of Standardization

ISTILAH	PENJELASAN
ISSB	International Sustainability Standards Board
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JULEHA	Juru Sembelih Halal
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KIP-Kuliah	Kartu Indonesia Pintar-Kuliah
KK	Kartu Kredit
KKB	Komite Keuangan Berkelanjutan
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KOPERBI	Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSK	Kajian Stabilitas Keuangan
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAKU	Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh
LBUT	Laporan Bank Umum Terintegrasi
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LEMHANNAS	Lembaga Ketahanan Nasional
LF	<i>Lending Facility</i>
LIKE IT	Literasi Keuangan Indonesia Terdepan
LK	Lembaga Keuangan
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

ISTILAH	PENJELASAN
LLD	Lalu Lintas Devisa
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPEM FEB UI	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
LP3E	Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LSB	Lembaga Selain Bank
LRUK	Limbah Racik Uang Kertas
LTV/FTV	<i>Loan/Financing To Value Ratio</i>
MAS	Monetary Authority of Singapore
MATRIC	<i>massive, technology based, responsive, dan consumer centric</i>
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
Minerba	Mineral dan batu bara
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
MLFF	<i>Multi Lane Free Flow</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPF	<i>Non Performing Financing</i>
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development

ISTILAH	PENJELASAN
OIKN	Otorita Ibu Kota Nusantara
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
P3JPH	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PAK	Panitia Antar Kementerian
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBI PUVA	PBI tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
PITPU	Penerbitan Instrumen dan Transaksi Pasar Uang
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKH	Program Keluarga Harapan
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PolTech	Policy Technology
PP	Peraturan Pemerintah

ISTILAH	PENJELASAN
PP DHE SDA	Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
PPKSK	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PTB	Program Tugas Belajar
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIKOPERBI	Rencana Induk Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIPABI	Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia
RIPAMBI	Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia
RIVIBI	Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPH	Rumah Potong Hewan
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RPP KKB	RPP Komite Keuangan Berkelanjutan
RSEOJK	Rancangan Surat Edaran OJK
SAA	<i>Strategic Asset Allocation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit

ISTILAH	PENJELASAN
SBN	Surat Berharga Negara
SBNT	Suku Bunga dan Nilai Tukar
SBP	<i>Strategic Business Plan</i>
SBV	State Bank of Vietnam
SDA	<i>software define access</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SEAVG	the South-East Asia Voting Group
SEKDA	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
SEKI	Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SOP	<i>Standard Operating Procedure/Standar Operasional Prosedur</i>
SPAN	Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRO	<i>Self-Regulatory Organization</i>
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STRANAS-PK	Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
SupTech	<i>Supervisory Technology</i>
SUSPI	Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia

ISTILAH	PENJELASAN
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
SWIFT	<i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications</i>
TBCCI	<i>The Best Contact Center Indonesia</i>
TOBAKU Halal	Toko Bahan Baku Halal
TD	<i>Term Deposit</i>
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TP2DD	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMB	Universitas Mercu Buana

ISTILAH	PENJELASAN
UMi	Ultra Mikro
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UUS	Unit Usaha Syariah
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VF	<i>Volatile Foods</i>
WB	World Bank
WC	<i>Working Committee</i>
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WWF	World Wildlife Fund
yoy	<i>Year on Year</i>



